PENGARUH RESPONSIBILITAS, KONTRIBUSI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Progam Studi Akuntansi Syariah

IAIN JEMBER

Oleh :

Lina Hardianti
NIM. E20153021

Dosen Pembimbing

Agung Parmono, SE., M.Si.
NIP. 19751216 200912 1 002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PENGARUH RESPONSIBILITAS, KONTRIBUSI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Progam Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Lina Hardianti
NIM. E20153021

Disetujui Pembimbing

Agung Parmono, SE., M.Si.
NIP. 19751216 200912 1 002

PENGARUH RESPONSIBILITAS, KONTRIBUSI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 27 Mei 2019

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
M. Saiful Anam, M.Ag.	**Aminatus Zahriyah, SE., M.Si**
NIP. 19711114 200312 1 002	NUP: 201603139

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I. ( )
2. Agung Parmono, SE., M.Si. ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ
إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : "Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Mujadalah:7)[1]

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Tangerang: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2012), 543.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadirat-Mu Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Moh. Rawi dan Ibu Siti Chusnul Agus Rini, yang selalu mendo'akanku, membimbingku dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materiil untuk keberhasilanku.
2. Ketiga kakakku Eko Sosialistyawan, Dyah Estu Sulistyo Ningrum dan Sri Ratna Sari beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'anya.
3. Kelima keponakanku Bima Nanta Sabadha Yudha, Reffan Askha Ramadhan, Maretha Aulia Walidiyah, Mohammad Azril Maulana dan Alifah Oktavia Walidiyah yang telah memberiku senyuman dan kebahagiaan.
4. Penyemangatku Hormayanto yang selalu menjadi partner berproses dalam segala aspek.
5. Teman-teman IAC 2015.
6. Keluarga Besar Akuntansi Syariah.
7. Keluarga Dawuhan Squard (Posko 11 KKN 2018) yang tersayang.
8. Keluarga Besar Assent Ace (Bidik Misi) IAIN Jember.
9. Teman-teman kontrakan Bumi Wahidah, Waqi'ah dan Halima yang mengajarkanku pentingnya kekeluargaan.
10. Almamaterku IAIN Jember.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas dua nikmatnya yaitu nikmat sehat dan sempat sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai mana menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yakni *Addinul Islam*.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto SE. MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Dr. Khamdan Rifai, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan ini.
3. Daru Anondo, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahannya dalam program perkuliahan dan penyelesaian progam S1.
4. Agung Parmono, SE., M.Si. sekaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahannya dalam program perkuliahan dan penyelesaian progam S1.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. M. Saiful Anam, M.Ag selaku ketua sidang skripsi.
7. Aminatus Zahriyah, SE., M.Si selaku sekretaris sidang skripsi.
8. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku penguji utama sidang skripsi.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. HM. Thoif Zamroni, SH.I dan Dias Wono Abardi, yang telah memberi izin penelitian, nasehat, bimbingan, dan bantuan untuk memperlancar penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh anggota Dewan yang bersedia mengisi kuisioner yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam bentuk doa atau apapun dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pengguna pada umumnya, *Amin ya rabbal alamin.*

Jember, 4 Mei 2019

Peneliti

Lina Hardianti
NIM. E20153021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Lina Hardianti, **Agung Parmono, SE., M.Si. 2019:** *Pengaruh Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD kabupaten Jember.*

Lembaga legislatif yang dalam hal ini DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi (menyusun per Undang-undangan), fungsi anggaran (menyusun anggaran) dan fungsi pengawasan (mengawasi kinerja eksekutif). Fungsi pengawasan disini dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal berhubungan dengan pengetahuan tentang anggaran yang dalam hal ini berbentuk pertanggungjawaban atas laporan keuangan dan untuk faktor eksternal berhubungan dengan konstribusi masyarakat dalam keikutsertaan mengevaluasi dan transparansi kebijakan publik.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Apakah responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember? (2) Apakah kontribusi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember? (3) Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember? (4) Apakah responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh signifikan responsibilitas terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember. (2) Untuk menganalisis pengaruh signifikan kontribusi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember. (3) Untuk menganalisis pengaruh signifikan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember. (4) Untuk menganalisis pengaruh signifikan responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Populasi dan sampel penelitian ini yaitu seluruh anggota dewan sebanyak 50 anggota Dewan dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 44 responden dengan teknik *proportionate randon sampling*. Alat anlisa data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan program SPSS Statistics Versi 22.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel responsibilitas nilai t_{hitung} 2,305 > t_{tabel} 2,021, nilai signifikan 0,026 < 0,05, variabel kontribusi masyarakat nilai t_{hitung} 3,145 > $_{tabel}$ 2,021, nilai signifikan 0,003 < 0,05, variabel transparansi kebijakan publik dengan nilai t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 2,021, nilai signifikan 0,011 < 0,05. Sedangkan secara simultan variabel responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai F_{hitung} 10,880 > F_{tabel} 2,833, nilai signifikan 0,000 < 0,05.

Kata kunci: Responsibilitas, kontribusi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Lina Hardianti, Agung Parmono, SE., M.Si. 2019: *Effect of Responsibility, Community Contributions and Transparency of Public Policy on Regional Financial Supervision (APBD) of Jember Regency DPRD.*

The legislative body, in this case the DPRD has three functions, namely the function of legislation (drafting per Act), the function of the budget (compiling the budget) and the function of supervision (overseeing executive performance). The supervisory function here is influenced by two factors namely internal factors and external factors. For internal factors related to knowledge about the budget in this case in the form of accountability for financial statements and for external factors related to the contribution of society in the participation of evaluating and transparency of public policy.

The formulation of the problems examined in this thesis are (1) Does responsibility have a significant effect on the regional financial supervision (APBD) of DPRD in Jember Regency? (2) Does the community contribution have a significant effect on the DPRD regional financial supervision (APBD) in Jember Regency? (3) Does public policy transparency have a significant effect on regional parliamentary oversight (APBD) in Jember Regency? (4) Does responsibility, community contribution and public policy transparency have a significant simultaneous effect on regional financial supervision (APBD) of DPRD in Jember Regency?

The objectives of this study are (1) To analyze the significant effect of responsibility on regional financial supervision (APBD) of DPRD in Jember Regency. (2) To analyze the significant influence of community contributions to regional financial supervision (APBD) of DPRD in Jember Regency. (3) To analyze the significant effect of public policy transparency on regional financial supervision (APBD) of DPRD in Jember Regency. (4) To analyze the effect of significant responsibility, community contributions and public policy transparency simultaneously on regional financial supervision (APBD) of DPRD in Jember Regency.

This study uses a quantitative approach with a type of field research research (field research). The population and sample of this study were all board members as many as 50 Board members by distributing questionnaires as many as 44 respondents using the proportionate randon sampling technique. Data analysis tools in the form of validity test, reliability test, classic assumption test and multiple linear regression analysis, hypothesis testing and test coefficient of determination (R2) with the help of SPSS Statistics Version 22 program.

This study can be concluded that partially the responsibility variable, community contribution and public policy transparency have a significant or positive effect on regional financial supervision. Responsibility variable value of t_{count} 2,305 > t_{table} 2,021, significant value 0,026 < 0,05, community contribution variable value of t_{count} 3,145 > t_{table} 2,021, significant value 0,003 < 0,05, public policy transparency variable with t_{count} 2,661 > t_{table} 2,021, significant value 0.011 < 0.05. While simultaneously the responsibility variable, community contribution and public policy transparency have a positive and significant effect on regional financial supervision with a calculated F_{value} of 10.880 > F_{table} 2.833, a significant value of 0.000 < 0.05.

Keywords: Responsibility, community contribution, public policy transparency and regional financial supervision

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
1. Variabel Penelitian	9
2. Indikator Variabel	10
F. Definisi Operasional	11
G. Asumsi Penelitian	13

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

H. Kerangka Konseptual 13

I. Hipotesis 14

J. Metode Penelitian 18

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 18

2. Populasi dan Sampel 18

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 20

4. Analisis Data 21

K. Sistematika Pembahasan 32

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 33

A. Penelitian Terdahulu 33

B. Kajian Teori 38

1. Responsibilitas 38

a. Pengertian Responsibilitas 38

b. Indikator Responsibilitas 40

2. Kontribusi Masyarakat 44

a. Pengertian Kontribusi Masyarakat 44

b. Indikator Kontribusi Masyarakat 45

3. Transparansi Kebijakan Publik 46

a. Pengertian Transparansi Kebijakan Publik 46

b. Indikator Transparansi Kebijakan Publik 47

4. Pengawasan Keuangan Daerah 49

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah 49

b. Indikator Pengawasan Keuangan Daerah 49

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 56

A. Gambaran Obyek Penelitian 56

B. Penyajian Data 68

1. Uji validitas 68

2. Uji Reliabilitas 70

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis 70

1. Uji Asumsi Klasik 70

a. Uji Normalitas 70

b. Uji Multikolinearitas 71

c. Uji Heteroskedastisitas 73

2. Analisis Regresi Linier Berganda 74

3. Pengujian Hipotesis 76

a. Uji t (Parsial) 76

b. Uji F (Simultan) 79

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 80

D. Pembahasan 81

1. Analisis Variabel Responsibilitas terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah 81

2. Analisis Variabel Kontribusi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 82

3. Analisis Variabel Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 83

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Analisis Variabel Independen terhadap Variabel Independen secara Simultan 84

BAB IV PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Kenaikan APBD Kabupaten Jember 5

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 33

3.1 Tabel Pimpinan DPRD Kabupaten Jember 60

3.2 Tabel Daftar Fraksi DPRD Kabupaten Jember 60

3.3 Tabel Pimpinan Komisi A 64

3.4 Tabel Pimpinan Komisi B 64

3.5 Tabel Pimpinan Komisi C 65

3.6 Tabel Pimpinan Komisi D 65

3.7 Tabel Hasil Uji Validitas..... 68

3.8 Tabel Hasil Uji Reliabilitas..... 70

3.9 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 72

3.10 Tabel Persamaan Regresi Linier Berganda 75

3.11 Tabel Uji t (Parsial)..... 77

3.12 Tabel Uji F (Simultan) 80

3.13 Tabel Koefisien Determinasi (R^2) 81

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Kerangka Konseptual 14

2.1 Gambar Siklus SRKIP 40

3.1 Struktur Pimpinan DPRD 66

3.2 Struktur Pimpinan DPRD 66

3.3 Struktur Pejabat dan Staf Sekertaris..... 67

3.4 Hasil Uji Normalitas 71

3.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 74

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian Skripsi
Lampiran 3	: Surat Rekomendasi Penelitian dari BAKESBANGPOL
Lampiran 4	: Surat Selesai Penelitian Skripsi
Lampiran 5	: Jurnal Penelitian
Lampiran 6	: Matriks Penelitian
Lampiran 7	: Blangko Ketersediaan Mengisi Kuesioner
Lampiran 8	: Kuesioner
Lampiran 9	: Data Hasil Angkat
Lampiran 10	: Hasil Output SPSS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Lampiran 11	: Hasil Output SPSS Uji Asumsi Klasik
Lampiran 12	: Hasil Output SPSS Regresi Linier Berganda
Lampiran 13	: Dokumentasi
Lampiran 14	: Biodata Mahasiswa

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dasar pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran semua warga negara. Berkenaan dengan hal itu pemerintah berusaha demi menciptakan keseimbangan fiskal dengan menegakkan kemampuan keuangan negara yang berasal dari pendapatan pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya untuk mengabulkan keinginan masyarakat. Salah satu ciri penting demi menciptakan keseimbangan tersebut yakni berlangsungnya sistem politik untuk mencocokkan berbagai keperluan yang terdapat di masyarakat. Transisi sistem politik, sosial dan kerakyatan serta ekonomi yang dibawa oleh peredaran reformasi mengakibatkan klaim yang bermacam-macam mengenai pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance).* Klaim ini perlu dipenuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Bersamaan dengan PP No 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (responsibilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan) oleh kepala daerah. [1]

Reformasi yang dipertahankan oleh seluruh masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Diantaranya agenda reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

[1] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Press, 2002), 25.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah.[2] Terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki *power*. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah hanya Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Dan yang penting dari itu adalah kedudukan diantara kedua lembaga tersebut bersifat sejajar dan menjadi mitra.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah

[2] Ibid., 109-110.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan responsibilitas dan transparansi.[3] Untuk mendukung responsibilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemerikasaan terhadap pengelolaan anggaran. [4]

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran, dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran yang titik fokusnya pada pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan daerah. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan

[3] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 155.
[4] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 231-232

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

oleh dewan, diantaranya adalah adanya kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.[5]

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Semetara Pramono menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah. Ia menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan.[6] Isma telah menguji penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel akuntabilitas sebagai variabel moderating dan hasil dari penelitian nya yaitu semua variabel moderating yakni akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan

[5] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 255.

[6] Isma Coryanata, "Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) studi kasus DPRD Kota Bengkulu", (Jurnal SNA X, Universitas Hasanudin, Makasar, 2007), vi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Daerah (APBD) secara signifikan. Namun keterbatasan pada penelitian Isma tidak memperhatikan variabel kontigensi dan kurang memperhatikan objek dalam penelitiannya sehingga hasil belum bisa digeneralisasikan.

DPRD Kabupaten Jember dipilih sebagai objek penelitian ini karena di dalam lembaga DPRD Kabupaten Jember jumlah anggota legislatif dari kalangan perempuan tidak mencapai 30% dari jumlah anggota dewan 50 hanya terdapat 10 anggota perempuan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember dalam tujuh tahun mulai dari tahun 2013-2019 mengalami kenaikan. Hal ini dapat di lihat dari tabel kenaikan APBD Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kenaikan APBD Kabupaten Jember

No	Tahun	Total APBD Kabupaten Jember
1.	2013	Rp 2,375 Triliun
2.	2014	Rp 2,666 Triliun
3.	2015	Rp 2,9 Triliun
4.	2016	Rp 3,443 Triliun
5.	2017	Rp 3,450 Triliun
6.	2018	Rp 3,5 Triliun
7.	2019	Rp 3,662 Triliun

Sumber: Data diolah

Serta untuk tahun 2018 Pemkab beserta DPRD Jember resmi menetapkan Perda APBD sebesar Rp 3,5 triliun dan akan di prioritaskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

publik.Kemudian terdapat tiga perda Prakarsa DPRD Jember pada tahun 2018 yang disahkan antara lain adalah Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Perda Pegendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda Penataan Kawasan Pemukiman dan Perumahan.[7]

Pemerintah Daerah tidak berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya, melainkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi kepemerintahan daerah. Peran DPRD disini sangat penting sebagai mitra dan pengawas dari kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai contoh peran DPRD dalam pemerintah yakni seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD, yang mana DPRD bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Sehingga membuktikan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam penetapan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember maka diperlukan pemerintahan yang transparan dan responsibel dalam melakukan segala program-programnya supaya masyarakat secara langsung dapat mengawasi pembangunan itu sendiri.

Alasan inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji lebih dalam, dengan ruang lingkup mengenai responsibilitas, kontribusi masyarakat

[8] Tribunnews.surya.co.id .1 Februari 2019, Pukul 22.00 wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan transparansi kebijakan publik dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarakan latar belakang masalah di atas, judul dari penelitian ini adalah: **"Pengaruh Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember (studi kasus anggota DPRD di Kabupaten Jember)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember?
2. Apakah kontribusi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember?
4. Apakah responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.[8] Adapaun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan responsibilitas terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kontribusi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember.
4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan.[9] Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi sektor publik berkaitan dengan responsibilitas, kontribusi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

[8] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 37.
[9] Murti Sumarni dana Salamah Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2006), 21.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi salah satu tulisan ilmiah guna mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang ilmu akuntansi sektor publik terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor pubik.

c. Bagi pemerintah daerah

Dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good government*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.[10]

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut:

[10] Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 108.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas (X). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).[11] Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

1) Responsibilitas (X_1)
2) Kontribusi masyarakat (X_2)
3) Transparansi kebijakan publik (X_3)

b. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

Sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat (Y). variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah:

Pengawasan keuangan daerah (Y)

2. Indikator Variabel

Setelah variabel penelitian terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan indikator-indikator penelitian yang merupakan rujukan empiris dari variabel yang akan diteliti.[12]

Berikut indikator-indikator dari variabel penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2002), 33.
[12] Tim Penyusun, *Pedoman*, 38.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Responsibilitas (X_1)

1) Perencanaan stratejik

2) Perencanaan kinerja

3) Pengukuran dan evaluasi kinerja

4) Pelaporan responsibilitas[13]

b. Kontribusi Masyarakat (X_2)

1) Aspirasi masyarakat

2) Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi

c. Transparansi Kebijakan Publik (X_3)

1) Kebijakan terbuka terhadap pengawasan

2) Akses informasi

3) Prinsip *check and balance*

d. Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

1) Penyusunan APBD,

2) Pengesahan APBD,

3) Pelaksanaan APBD, dan

4) Pertanggungjawaban APBD.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.[14]

[13] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 100.
[14] Ibid,, 36.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Responsibilitas

Responsibilitas (pertanggungjawaban) adalah kewajiban yang diperlukan untuk memberikan penjelasan dan melaporkan segala perilaku dan aktivitasnya dalam bidang keuangan kepada atasannya.

2. Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat terkait tahap pengidentifikasian masalah yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai pilihan solusi untuk menangani masalah, upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam tahap mengevaluasi perubahan yang terjadi.

3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah suatu hal yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat di pertanggung jawabkan yang meyangkut pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran keuangan daerah (APBD).

Jadi maksud dari judul penelitian ini yakni pengaruh responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember yaitu penilaian mengenai tindakan atau pelaksanaan dari anggota dewan terkait tanggung jawabnya, keterkaitan masyarakat dalam mengevaluasi dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bagaimana memberikan transparansi kebijakan secara publik dalam kursi legislatif mengenai pengawasan APBD di DPRD Kabupaten Jember.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data.[15] Pada asumsi penelitian terdapat berbagai pernyataan yang bisa diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan dalam penelitian. Asumsi dasar penelitian ini adalah responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember.

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan struktur logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana, kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongkrit.[16] Dalam penelitian ini kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

[15] Tim Penyusun, *Pedoman*, 39.
[16] http://renirespita.blogspot.co.id/2015/05/mtode-penelitian-kerangka-konseptual.html. 19 Mei 2018, pukul 09.21 wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

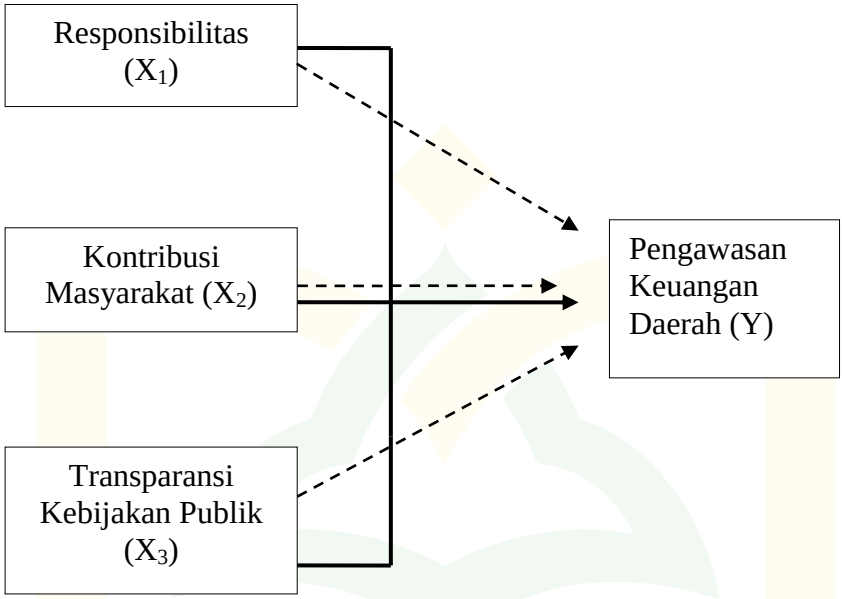

Sumber: Data diolah

Keterangan: ⟶ = Secara Simultan

- - - - - - → = Secara Parsial

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.[17] Oleh kerena itu, hipotesis dibuat berdasarkan hasil penelitian masa lalu atau berdasarkan data-data yang telah ada sebelum penelitian dilakukan secara lebih lanjut yang tujuannya untuk menguji kembali hipotesis tersebut. Maka, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

[17] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 90.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. **Hubungan Responsibilitas terhadap Pengawasan Keuangan Daerah**

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Bersamaan dengan PP No. 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diperlukannya pertanggungjawaban (responsibilitas) dalam bentuk laporan keuangan berupa neraca, arus kas, dan laporan realisasi anggaran. Untuk menciptakan responsibilitas kepada publik diperlukan partsipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Dengan adanya pertanggungjawaban maka akan memudahkan dalam melakukan pengawasan keuangan. Hal ini sangat penting berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

H1: Responsibilitas (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

2. **Hubungan Kontribusi Masyarakat terhadap Pengawasan keuangan Daerah**

Kontribusi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kontribusi masyarakat (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Selain adanya kontribusi, responsibilitas dan masyarakat dalam siklus anggaran , transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Adanya pengumuman kebijakan anggaran
2. Adanya dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat
5. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik

Menurut peneiti asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis penelitiannya adalah:

H3: Transparansi kebijakan publik (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Hubungan Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hubungan antara responsibilitas dengan pengawasan keuangan daerah didasarkan pada kesiapan dalam mempertanggungjawabkan hasil akhir dari kegiatan pelaporan. Kontribusi masyarakat memiliki hubungan kuat terhadap pengawasan keuangan daerah terbukti bahwa keberadaan masyarakat sangat penting dalam artian sebagai pendukung dan berpartisipasi didalamnya baik memberikan saran atau kritikan untuk kemajuan bersama. Kemudian transparansi kebijakan publik dalam konteks keterbukaan mengenai akses informasi sangat mendukung adanya pengawasan keuangan daerah untuk memudahkan dalam bersinegri demi kesejahteraan bersama.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik memiliki peranan penting dalam menunjang kemajuan dan keterbukaan mutu anggota dewan terkait pengawasan keuangan daerah untuk menghindari kebocoran anggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan peneliti ini adalah:

H4: Responsibilitas (X_1), kontribusi masyarakat (X_2) dan transparansi kebijakan publik (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

J. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yakni penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisa dengan teknik statistik. Jenis penelitian ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan menyebarkan data angket atau kuesioner untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka.

Adapun jenis penelitiannya berdasarkan tempat adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden,[18] yang mana digunakan untuk pengumpulan data dari objek penelitian. Sumber data yang diambil berupa data primer dan data sekunder.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas.[19] Populasi bisa berupa subjek maupun objek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dewan DPRD di Kabupaten Jember sebanyak 50 anggota.

Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Pengambilan sampel dilakukan

[18] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 28.
[19] Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 69.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan metode *probability sampling* (*random sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel yang mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.[20]

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana:

n : Jumlah elemen atau anggota sampel

N : Jumlah elemen atau anggota populasi

e : *Error level* (tingkat kesalahan)

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 50 anggota dewan dan posisi yang ditetapkan atau tingkat signifikan 0,05, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{50}{1 + 50.0{,}05^2}$$

= 44,44 dibulatkan menjadi 44

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 anggota dewan.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 63.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kenenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka pada teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.[21] Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mendapatkan data yang sesungguhnya dari para responden yang dituju dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada anggota DPRD di Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, setiap pernyataan yang dikembangkan dari indikator dalam kuesioner penelitian. Untuk pemberian skor pada angket dalam penelitian ini menggunakan *skala likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan *skala likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.[22]

Dalam penelitian ini maka kriteria yang digunakan untuk penilaian yaitu menggunakan s*kala likert* sebagai berikut :

---

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2014), 137 dan 142.

[22] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*(Bandung: Alfabeta, 2014), 136.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
2) Setuju (S) diberi skor 4
3) Netral (N) diberi skor 3
4) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
5) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Penggunaan lima kategori dalam skala tersebut di atas karena dapat dipandang mewakili dengan baik tingkat intensitas penilaian responden.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut:

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner.[23]

4. Analisis Data

Bagian ini akan menjelaskan tentang teknis analisis data yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data

[23] Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi, 2006), 69.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terkumpul.[24] Adapun alat analisis kuantitatif dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisa Data Kuantitatif

Analisa data kuantitatif adalah analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, serta data yang berupa angka atau bilangan.[25] Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian, maka peneliti menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh.[26]

b. Alat Analisis Data

1) Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendakdiukur/diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti.[27]

Adapun rumusan yang digunakan untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus

[24] Sugiono, *Metode Penelitian*, 147.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 147.
[26] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan* Aplikasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 170.
[27] Riduwan, Adun Rusyana dan Enas, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 194.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

korelasi. Hasil r_{hitung} kita dibandingkan dengan r_{tabel} di mana df = n-2 dengan signifikan 5%. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka valid dan sebaliknya.[28]

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Reliabilitas artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulang hasilnya akan tetap sama (konsisten).[29]

Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Alat ukut mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka reliabel dan sebaliknya.[30]

3) Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbias Estimator*/BLUE) dari suatu persamaan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil (*least Squares*), perlu dilakukan pengujian dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi:[31]

[28] V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 192.
[29] Riduwan, Adun Rusyana dan Enas, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0*, 194.
[30] V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitia*, 192.
[31] Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 252.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a) Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.[32]

Grafik tersebut menggunakan *Normal Probability Plot*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Distribusikumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan ploting.[33]

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk korelasi yang tinggi atau sempurna di

[32] Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 77.
[33] Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: ANDI, 2011), 69.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinieritas.

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.[34]

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai *Predicted Standardized* sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai *Residual Standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati di mana

[34] Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, 81-90.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.[35]

4) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan teknik analisis peramalan nilai pengaruh dua variable atau lebih terhadap variable terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel atau lebih dengan satu variabel terikat.[36]

Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.Sedangkan variabel terikatnya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$

Keterangan:

Y :Variabel pengawasan keuangan daerah

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Variabel responsibilitas

X_1 : Variabel responsibilitas

β_2 : Koefisien variabel kontribusi masyarakat

X_2 : Variabel kontribusi masyarakat

B_3 : Koefisien Variabel transparansi kebijakan publik

X_3 : Variabel transparansi kebijakan publik

[35] Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, 95.

[36] Riduwan dan Sunarto, *Pengantar statistika untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis* (Bandung:Alfabeta, 2014), 108.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ϵ :Error

Untuk mengetahui serta menentukan pengaruh koefisien variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan bantuan *SPSS*.

a) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval.[37] Adapun langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut:

(1) Menentukan hipotesis:

a. H_a1: b = 0 artinya dalam notasi hipotesis H_a adalah responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

$H_0 1$: b $\neq$ 0 artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

b. H_a2: b = 0 artinya dalam notasi hipotesis H_a adalah kontribusi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

$H_0 2$: b $\neq$ 0 artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah kontribusi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

[37] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 154.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. H_a3: b = 0 artinya dalam notasi hipotesis H_a adalah transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

H_03: b ≠ 0 artinya dalam notasi hipotesis H_0 adalah transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

(2) Menentukan derajat kepercayaan 5% (α = 0,05) dari t_{hitung} dan t_{tabel}.

(3) Menentukan t_{hitung} dengan rumus:[38]

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r: nilai koefisien korelasi

n: jumlah sampel

(4) Menentukan t_{tabel} (diambil dari hasil tabel distribusi t pada α=5%). Rumus t_{tabel} = N-k

(5) Membuat kesimpulan:

Kriteria uji t:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa variabel independen (X) secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Y).

[38] Mundir, *Statistik Pendidikan* (Jember: STAIN-Press Jember, 2014), 119.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel independen (X) secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen (Y).

b) Uji F (Simultan)

Pada regresi berganda, yakni regresi yang variabel bebasnya lebih dari satu, pengujian tidak hanya dilakukan pada koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas, namun juga perlu dilakukan pengujian secara simultan (bersama-sama). Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dapat dilakukan dengan uji F. Hal ini dilakukan dengan jalan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel}.[39]

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu responsibilitas (X_1), kontribusi masyarakat (X_2), transparansi kebijakan publik (X_3) di mana mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen yaitu pengawasan keuagan daerah (Y). Berikut langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

(1) Merumuskan hipotesis

(a) H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi

[39] Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran* (Malang: UMM Press, 2004), 179.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebijakan publik terhadap variabel dependen pengawasan keuangan daerah.

(b) H_a : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu Responsibilitas, Kontribusi masyarakat dan Transparansi kebijakan publik terhadap variabel dependen pengawasan keuangan daerah.

(2) Menentukan tingkat signifikansi dengan menggunakan α = 5% (α = 0,05) dari F_{hitung} dan F_{tabel}.

(3) Menentukan F_{hitung} dengan rumus:[40]

$$F_{hitung} = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Keterangan:

R : nilai korelasi ganda

k : jumlah variabel bebas (independen)

n : jumlah sampel

(4) Menentukan F_{tabel} dengan pada α = 5% dengan tingkat keyakinan 95%

(5) Membuat kesimpulan

(a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima maka menyatakan bahwa masing-masing variabel

[40] Riduwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2014), 86.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

(b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak maka menyatakan bahwa masing-masing variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R^2adalah koefisien determinasi yakni suatu nilai yang menggambarkan total variasi dari Y (variabel dependen) dari suatu persamaan regresi.[41] R^2 merupakan fungsi yang menaik (*non decreasing function*) dari variabel-variabel bebas yang tercakup dalam persamaan regresi linier berganda. Semakin banyak variabel yang tercakup dalam model, makin menaik fungsi tersebut, artinya makin besar nilai R^2 tersebut.[42]

Biasanya R^2 berkisar antara 0 sampai 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$, yang berarti variasi dari variabel bebas semakin dapat menjelaskan variasi dari variabel tidak bebas bila angkanya semakin mendekati 1. Jadi untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan dengan nilai *R Square*. Adapun rumus koefisien determinasi adalah:

[41] Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran*, 178.
[42] Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif, Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 131.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

$R^2 = (r)^2 \times 100\%$

Di mana:

R^2 : koefisien determinasi

r : koefisien korelasi.

K. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan, bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Penyajian Data dan Pembahasan, bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB IV : Penutup, bab ini membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Cristin Jois Karubaba (2017)[43]	"Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating di Kabupaten Nabire"	Perbedaan penelitiaan pertama dengan peneltian ini terletak pada study kasus yang berbeda, pada penelitian ini study kasus di DPRD kabupaten Jember sedangkan pada penelitian terdahulu study kasus di Kabupaten Nabire.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pengawasan keuangan daerah, serta metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kuantitatif.
2.	Umi Hanik (2017)[44]	"Peran anggota legislatif	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian ini

[43] Cristin Jois Karubaba, "Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating di Kabupaten Nabire", (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2017), vi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jemb digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting* dan *controling* di DPRD Kabupaten Jember"	kedua ini terletak pada pendekatan penelitian yaitu kualitatif serta variabelnya yaitu peran anggota legislatif perempuan dan pemberdayaan ekonomi.	dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan objek penelitian di DPRD Kabupaten Jember.
3.	Gerryan Putra (2017)[45]	"Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu Hulu"	Perbedaan penelitian ketiga ini terletak pada variabel terikatnya yaitu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.
4.	Baskara Adi Nugraha (2015)[46]	"Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja	Perbedaan penelitian keempat ini terletak pada variabel bebas pemeriksaan dan variabel terikat kinerja	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode

[44] Umi Hanik, "Peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation*, *budgeting* dan *controling* di DPRD Kabupaten Jember", (Sripsi, IAIN Jember, 2017), vi.

[45] Gerryan Putra, "Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu Hulu", (Jurnal, JOM Fekom, Hulu, 2017), vi.

[46] Baskara Adi Nugraha, "Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten Sumatra", (Naskah publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakata, 2015), vi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten Sumatra"	penyelenggaraan pemerintah daerah.	penelitian kuantitatif.
5.	Rido Agung Gigih Krisherdian (2015)[47]	"Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember"	Perbedaan penelitian kelima dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel terikatnya yakni kinerja pemerinah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian berada di Kabupaten Jember.
6.	Hery Harjono, Heny Kurniawati dan Pahala (2014)[48]	"Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran"	Perbedaan penelitian keenam dengan penelitian ini terletak pada variabel terikat yaitu pengelolaan anggaran.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda.

Sumber: Data diolah

1. Penelitian yang di lakukan oleh Cristin Jois Karubaba dengan judul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating di Kabupaten Nabire dengan fokus

[47] Rido Agung Gigih Krisherdian, "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember", (Jurnal, Universitas Jember, Jember, 2015), vi.

[48] Hery Harjono, Heny Kurniawati dan Pahala, "Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran (studi kasus universitas Bina Nusantara)", (Jurnal, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2014), vi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian yaitu apakah pengetahuan dewan, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?. Dengan mengunakan metode penelitian kuantitatif yang menghasilkan bahwa seluruh variabel bebas mampu mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 37,5 % dan sisanya 37,5 % di pengaruhi faktor lain.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Hanik dengan judul Peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation, budgeting* dan *controling* di DPRD Kabupaten Jember dengan fokus penelitian bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Jember dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat? Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi *legislation, budgeting* dan *controling*? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Jember adalah menjalankan fungsi yang sudah ditetapkan di DPRD Jember yaitu fungsi *legislation, budgeting* dan *controling*. Semua anggota DPRD menjalankan fungsi secara bersama-sama tidak memandang anggota perempuan ataupun laki-laki. Peran anggota DPRD perempuan melalui fungsi *legislation* yaitu ikut serta bersama semua anggota DPRD dalam membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui fungsi *budgeting* yakni ikut bersama-sama dalam membahas rancangan APBD serta anggota legislatif perempuan juga ikut dalam melakukan *control* terhadap semua

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kegiatan yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, rancangan tentang APBD dan perubahan mengenai rancangan APBD.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gerryan Putra dengan judul Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu Hulu dengan fokus penelitian apakah akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu Hulu?. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menghasilkan bahwa semua variabel bebas tidak bepengaruh secara signifikan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Baskara Adi Nugrahadengan judul pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten Sumatra dengan fokus penelitian yaitu apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah?. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menghasilkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,0551>0,05), sehingga hipotesis tidak diterima.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rido Agung Gigih Krisherdian dengan judul penelitian pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember dengan fokus penelitian apakah terdapat pengaruh signifkan antara transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember?. Dengan menggunakan metode kuantitatif yang menghasilkan bahwa secara statistik signifikan terdapat pengaruh positif transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hery Harjono, Heny Kurniawati dan Pahala dengan judul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran dengan fokus penelitian apakah akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran? Dengan menggunakan metode kuantitatif yang menghasilkan penelitian bahwa akuntabilitas, dan transparansi secara bersama-sama mempunyai hubungan yang positif terhadap pengelolaan anggaran.

B. Kajian Teori

1. Responsibilitas

Menurut *The Oxford Advance Leaner's Dictionary*, responsibilitas adalah *"required or expected to give an explanation for one's action"*. Dalam responsibilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melapokan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuanagan kepaa pihak yang lebih tinggi. Tolak ukur untuk mengukur kinerja adalah kewajiban imdividu dan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja melalui pengukuran subjektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam konsep

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

responsibilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup praktik kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Carino, "responsibilitas merupakan evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otorisasinya atau sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.

Menurut Chartey, responsibilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, yang mana dan bagaimana. Responsibilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutamadalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.[49]

Responsibilitas kinerja Instansi Pemerintah Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, disusul Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, dan Keputusan Kapala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyususnan Pelaporan Responsibilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sera Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Responsibilita Kinerja Instansi Pemerintah; adala payung kebijakan untuk membangun sistem responsibilitas di Indonesia.

Sistem Responsibilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SRKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibanuntuk mempertanggugjawabkan keberhasilan dan kegagalan

[49] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 104-105.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pelaksanaan misi organisasi. Sebagai suatu sistem, SRKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja.[50]

Siklus SRKIP adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus SRKIP

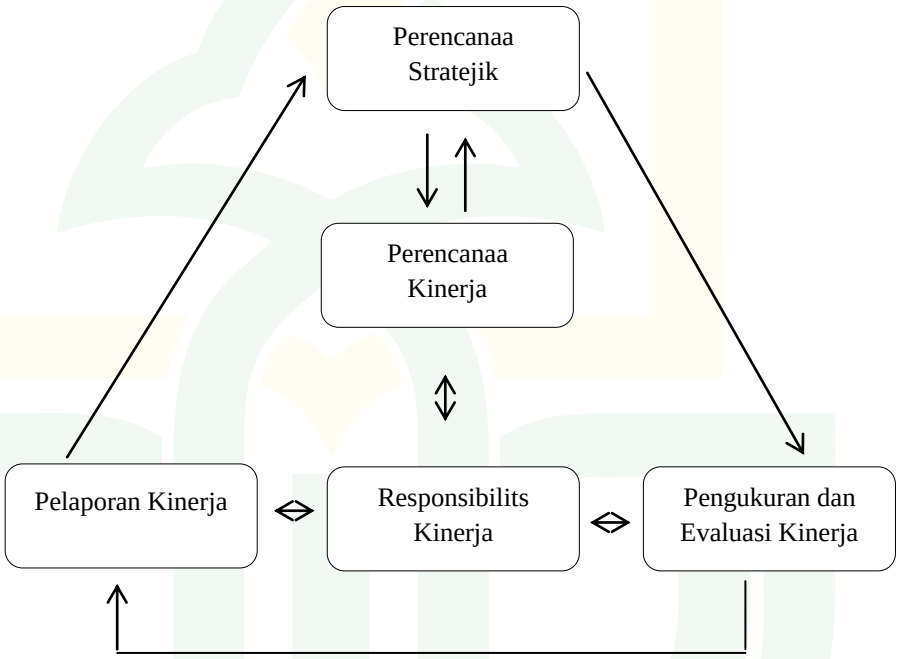

Sumber: Sedarmayanti, 2009

a. Perencanaan Stratejik

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melaksanakan mandat. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan

[50] Ibid., 109-110.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

organisasi internal dan eksternal merupakan langkah penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*oportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisisterhadap unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana stratejik yang disusun instansi pemerintah harus mencakup:

1. Pernyataan visi dan misi.
2. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya.
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

b. Perencanaan Kinerja

Rencana kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut perencanaan stratejik, di dalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan indikator kinerja kunci yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan suatu periode tertentu.[51]

Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai:

[51] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, 110.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan.
2. Program yang akan dilaksanakan.
3. Kegiatan, indikator kinerja, dan target yang diharapkan dalam suatu kegiatan.

c. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan alat manajer untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan responsibilitas. Untuk melaksanakan kedua hal tersebut, lebih dahulu ditentukan tujuan program secara jelas. Setelah program di desain, harus termasuk penciptaan indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan laporan responsibilitas. Instansi pemerintah dikatakan berhasil jika terdapat bukti pencapaian yang mengarah pada pencapaian misi.

Pengukuran kinerja, terdiri dari:

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yanag telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Evaluasi kinerja bertujuan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas.[52]Analisis efisiensi dilakukan dengan cara melakukan pembandingan antara output dengan input, sehingga akan dapat digambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Analisis tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat. Dalam analisis ini perlu dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

d. Pelaporan Responsibilitas

Laporan responsibilitas kinerja instansi pemerintah harus disampaikan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan laporan harus mengikuti prinsip yang lazim, disusun secara jujur, objektif dan transparan dan memerlukan prinsip sebagai berikut:[53]

[52] Ibid., 111.
[53] Ibid., 112.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Pertanggungjawaban, harus jelas hal yang dikendalikan dan yang tidak dikendalikan pihak yang melaporkan dan harus dimengerti pembaca laporan.
2. Pengecualian, yang dilaporkan penting dan terdepan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi bersangkutan seperti keberhasilan dan kegagalan, perbedaan realisasi dan target.
3. Perbandingan, laporan dapat memberi gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibanding dengan periode lain.
4. Responsibilitas, sejalan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip pengecualian, prinsip ini mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah hal yang dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksaan rencana.
5. Manfaat, diharapkan manfaat laporan harus lebih besar dari biaya.

2. Kontribusi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al*. kontribusi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.[54]

[54] Ach. Wazir Ws., *et al*., ed., *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project, 1999), 29.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kontribusi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[55]

1. Aspirasi masyarakat

   Aspirasi adalah keinginan dan harapan individu akan suatu prestasi atau suatu keberhasilan. Aspirasi akan mengarah pada aktivitas individu yang untuk lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.[56]Sedangkan aspirasi masyarakat itu sendiri adalah usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai. Aspirasi disinipun hanya akan menjadi sebatas usulan dan harapan masyarakat yang tidak akan terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

2. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi

   Secara garis besar, amanat bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap sesuatu kebijakan daerah dapat disistematisir sebagai berikut: [57]

[55] Isbandi Rukminto Adi., *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. (Depok: FISIP UI Press, 2007), 27.
[56] http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aspirasi/. 14 April 2018, Pukul 09.08 wib.
[57] http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9356-partisipasi-masyarakat-dalam-pembuatan-dan-evaluasi-kcbijakan-daerah.html. 14 April 2018, pukul 09.52 wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Setiap pembuatan kebijakan daerah yang baru, baik berupa keputusan kepala daerah maupun peraturan daerah, senantiasa wajib melibatkan masyarakat daerah untuk berpartisipasi;
b. Setiap kebijakan daerah yang baru, yang tidak melibatkan masyarakat daerah dapat menyebabkan kebijakan daerah tersebut dibatalkan oleh pemerintah atasan;
c. Masyarakat berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi atas sesuatu kebijakan daerah yang telah ada, dan apabila dipandang perlu dapat mengajukan usul agar kebijakan daerah yang dinilai olehmasyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tuntutan keadaan /zaman, ditinjau kembali dan apabila perlu dapat diusulkan untuk dicabut;
d. DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan aspirasi masyarakat;
e. Masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah), serta menyampaikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara (termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah).

3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

organisasi badan usaha.[58] Tujuan transparansi kebijakan publik yaitu untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.[59] Terutama informasi handal berkaitan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang di hasilkan pemerintah daerah.

1. Kebijakan Terbuka terhadap Pengawasan

   Kebijakan disini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang bersifat terbuka dalam hal pengawasan kuangan daerah yang bersifat jelas, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mempunyai pedoman untuk ikut serta dalam mengevaluasi baik kinerja dan kualitas dari pemerintahan daerah.

2. Akses informasi

   Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-¬undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara

[58] Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 48.
[59] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 290.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

negara lainnya.[60] Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan responsibiltas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Prinsip *Check and Balance*

Prinsip *check and balances* sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol di antara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang kekuasaan yang lain. Secara konseptual, prinsip check and balance dimaksudkan agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara sehingga kekuasaan dalam negara haruslah diatur dengan seksama.[61]

---

[60] https://ppid.kominfo.go.id/2011/03/15/pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi/, 14 April 2018, Pukul 11.35 wib.

[61] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, 290.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.[62]

1. Penyusunan APBD

a) Perencanaan

Penyusunan rancangan APBD terkait erat dengan perencanaan yang dilakukan di daerah. Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pada pemerintan daerah terdiri dari tiga kategori yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).[63]

b) Kebijakan umum APBD

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman antara lain memuat:

(1) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah

[62] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (*Jakarta: Rajawali Press, 2002), 420-421.
[63] Ibid., 378

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(2) Prinsip dan kebijakan penyususnan APBD tahun anggaran berikutnya

(3) Teknis penyusunan APBD

(4) Hal-hal khusus lainnya

b. Prioritas dan plafon anggaran sementara

Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara dilakukan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kepala daerah berdasrakan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun RKA-SKPD.

c. Rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD

RKA-SKPDdisusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarakan prestasi kerja.

d. Penyiapan Raperda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plfon anggran sementara, perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, sera capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standart belanja, standart satuan harga dan standart pelayanan minimal. Dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yaitu nota keuangan dan rancangan APBD.

2. Pengesahan APBD

a. Penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD[64]

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan APBD oleh DPRD menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

b. Persetujuan raperda tentang APBD

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggran yang

[64] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, 384-389.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujua di atas tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

c. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran RAPBD

Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Evaluasi yang dimaksud disisni bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentigan publik dengan kepentimgam aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi tersebut di sampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya lima belas hari terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut.

d. Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Rancangan yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditetapkan.

3. Pelaksanaan APBD

a. Asas umum pelaksanaan APBD

Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarakan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[65]

b. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran yaitu kepala SKPD.

c. Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah

Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah disini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Namun pada ketentuan ini dikecualikan terhadap

[65] Ibid, 390-396.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan layanan umum daerah (BLUD).

d. Pelaksanaan anggaran belanja daerah

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengecualian dalam hal ini adalah untuk belanja yang bersifat mengikat dan brsifat wajib.

e. Pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah

Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pembiayaan, semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh PPKD.

4. Pertanggungjawaban APBD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.[66] Laporan keungan tersebut terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

[66] Ibid., 407-408.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga DPRD Kabupaten Jember

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda membentuk badan yang di sebut dengan Volksraad sebagai badan legislatif yang dapat disamakan dengan Staten General atau parlemen di negara Belanda. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1918 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Graaf Van Limbung Stirum. Namun dari penelusuran dokumentasi sejarah, pada masa ini di Kabupaten Jember belum ditentukan adanya lembaga/badan legislatif semacam ini, sebab Volksraad dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda hanya ditingkat pusat. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga Belanda meninggalkan Indonesia dengan menyusul penduduk Jepang pada bulan maret 1942. Lembaga legislatif yang bernama Volksraad bubar dengan sendirinya. Di samping itu, tentara pendukung Jepang tidak menghendaki adanya badan-badan perwakilan rakyat. Kemudian mereka membentuk lembaga semacam ini pada pada bulan september 1943 dengan nama "Tyuuoo Sangi in" di tingkat pusat dan "Sangi in" di tingkat daerah, namun tidak lebih sebagai dewan penasehat dimana keanggotaannya melalui pengangkatan atau tidak melalui pemilihan.[67]

[67] Farouq, *Selayang Pandang DPRD Kabupaten Jember* (Jember: Sekretaris DPRD Kabupaten Jember, 2016), 20-21.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.a mber.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada masa revolusi fisik paska kemerdekaan, dengan dikeluarkannya Undng-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) pada tanggal 23 november 1945, maka KIND (kecuali untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta) dibentuk pada tingkat karesidenan, kabupaten, kota berotonomi dan daerah-daerah lain yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Menurut Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di tingkat karesidenan ditentukan sebanyak-banyaknya 100 orang. Sedangkan untuk tiap kabupaten / kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebanyak-banyaknya 50 orang. Menurut penjelasan UU No. 1 tahun 1945, Komite Nasional Daerah (KND) memilih sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai anggota badan eksekutif yang bersama-sama dan di pimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari di daerah masing-masing. Dalam perkembangan berikutnya, KND tingkat kawedanan dan kecamatan di bubarkan, sehingga hanya ada di tingkat karesidenan dan kabupaten. Sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah, badan ini kemudian berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun demikian, para anggota DPRD ini belum dipilih melalui pemilihan umum, melainkan melalui penunjukkan atau pengangkatan. Kenyataannya sebagian besar anggota DPRD ini berasal dari para anggota KND yang lama (baik di tingkat karesidenan maupun kabupaten). Berdasarkan penelusuran dokumentasi, sulit ditemukan informasi tentang keberadaan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KND di Kabupaten Jember. Ketidaktersediaan dokumentasi serta para pelaku sejarah yang terdiri dari para tokoh pelaku masa lalu yang berkiprah di bidang ini menjadi kendala tersendiri untuk mendeskripsikan keberadaan lembaga KNID di Kabupaten Jember peroide itu.[68]

Setelah agresi militer pertama tahun 1947, penjajah Belanda membentuk "Dewan-dewan Perwakilan Rakyat" di tiap kabupaten dengan jalan dilaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Ordonansi tanggal 13 agustus 1948 (*Staatsblad* No. 170) *Recomba* (*Regeerings Commisaris Bestuur Aangelegenheden*) memberi kesempatan pada rakyat di sejumlah Jawa Timur melaksanakan pemilihan umum untuk memilih calon wakil-wakil rakyat yang sudah steril duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) kabupaten dan kota diseluruh Jawa Timur serta pada bulan september tahun 1948 dilaksanakan pemilihan umum yang melahirkan terbentuknya DPRS. Secara kelembagaan, DPRS bentukan Belanda itu bisa terwujud di seluruh Jawa Timur yang kemudian pada tanggal 14 oktober 1948 dilaksanakan pelantikan DPRS Kabupaten Jember. Hasil penelusuran dokumentasi mengenai arsip-arsip yang berhubungan dengan DPRS yang ada di Kabupaten Jember tidak ditemukan data tentang DPRS baik yang menyangkut bentuk struktur organisasi dan anggota. Hanya terdapat data bahwa pada tahun 1950 berdasarkan keputusan DPRS: Dk. 2/UU/III tanggal 14 agustus 1950 dan surat nomor Dk. 6/PD.III tanggal 30 september 1950 ditunjuk beberapa

[68] Ibid., 21-22

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

orang untuk duduk dalam panitia persiapan pembentukan DPRD sementara atau DPRDS.

Pada tanggal 10 juli 1948, pemerintah Indonesia saat itu memberlakukan UU No. 22 tahun 1948 yaitu undang-undang pokok tentang pemerintah daerah. Menurut pasal 2 Undan-undang ini, pemerintah daerah terdiri DPRD dan DPD. Dengan demikian, untuk pertama kalinya secara resmi istilah DPRD dipakai sebagai badan legislatif daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 1948 secara jelas menentukan bahwa jumlah dan komposisi keanggotaan serta pemilihan anggota DPRD akan ditentukan berdasarkan Undang-undang tersendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah kemudian memberlakukan UUD No. 7 tahun 1950 tentang pemilihan DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (akronim DPRD Kabupaten Jember) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jember tetap 50 kursi dimana Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi partai mayoritas dengan perolehan 9 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dengan 8 kursi, lalu Partai

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi.[69]

2. Jumlah Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Jember

Tabel 3.1
Pimpinan DPRD Kabupaten Jember[70]

Jabatan	Nama	Fraksi
Ketua	H. Thoif Zamroni, S.HI	Gerindra
Wakil Ketua	H.M. Ayub Junaidi	PKB
Wakil ketua	Dr. Ni Nyoman Putu Martini	PDIP
Wakil Ketua	dr. Yuli Priyanto	PKS
Sekretaris DPRD	Drs. M. Farouq	Nasdem

Sumber: Situs Resmi DPRD Kabupaten Jember, 2019

Tabel 3.2
Fraksi di DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019

No.	Fraksi	Jumlah Anggota	Ketua
1.	F-Gerindra	9	Drs. Masduki
2.	F-PKB	8	Moch. Hafidi, S.SOS.
3.	F-PDIP	7	Drs. Agus Sofyan
4.	F-PKS	6	Mashuri Harianto, S.P.
5.	F-Nasdem	5	Hj. Jafaroh Wafi
6.	F-Golkar	5	Yudi Hartono, SE.
7.	F-Hanura & Demokrat (Harkat)	3+2	Hariana

[69] Dprd-Jemberkab.go.id. 27 Maret 2019, Pukul 20.38 wib.
[70] Ibid,.Pukul 20.45 wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

8.	F-PPP dan PAN	3+2	H. Moh Ely Yusup
	TOTAL	50	

Sumber: Situs Resmi DPRD KabupatenJember, 2019

Jadi di DPRD Kabupaten Jember terdapat 50 anggota Dewan dengan rincian sebagai berikut, 9 orang dari partai Gerinrda, 8 orang dari partai PKB, 7 orang dari partai PDIP, 6 orang dari partai PKS, 5 orang dari partai Nasdem, 5 orang dari partai Golkar, 3 orang dari partai Hanura dan 2 orang dari partai Demokrat, 3 orang dari partai persatuan pembangunan dan 2 orang dari partai Amanat Nasional.

3. Lokasi atau Letak Geografis DPRD Kabupaten Jember

Kantor DPRD Kabupaten Jember terletak di jalan Kalimantan no. 86, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.[71] Alamat itu berada di tengah-tengah kota dan tidak jauh dari jantung kota Jember +/- 500 meter di kota Jember dengan batas-batas:

Utara : Kabupaten Bondowoso

Timur : Kabupaten Banyuwangi

Selatan : Kabupaten Lumajang

Barat : Kabupaten Probolinggo

Ditinjau dari ketinggian di atas permukaan air laut, Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 sampai dengan 10 meter. Kawasan Kabupaten Jember beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan terjadi

[71] Farouq, *Selayang Pandang DPRDKabupaten Jember* (Jember: Sekretariat DPRD Kabupten Jember,, 2016).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pada bulan oktober hingga april sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan april sampai dengan oktober.

Temperatur di Kabupaten Jember hampir sama dengan wilayah lainnya yang berketinggian +/- 0 sampai 10 meter di atas permukaan air laut dengan suhu udaranya relatif panas sebagaimana daerah dataran rendah yang pada umumnya yaitu antara 20 sampai dengan 30°C.

4. Larangan Anggota DPRD Kabupaten Jember

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya

b. Hakim pada peradilan

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta akuntan publik, konsultan, advokasi atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta dilarang menerima gratifikasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Komisi DPRD Kabupaten Jember

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pinjaman DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi mempunyai tugas dan kewajiban :[72]

a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daeran dan rancangan keputusan DPRD
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
d. Membantu pimpinan dewan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan atau masyarakat kepada DPRD
e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan dewan
h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
i. Mengajukan usul kepada pimpinan dewan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi

[72] Dprd-Jemberkab.go.id. 27 Maret 2019, Pukul 21.05 wib.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan dewan tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019 terdiri atas 4 (empat) komisi, yang masing-masing sebagai berikut:

Komisi A : Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Tabel 3.3
Daftar Pimpinan Komisi A

No.	Nama	Partai Politik	Jabatan
1.	Mashuri Harianto, S.P.	PKS	Ketua
2.	Agus Widianto, SE.	PAN	Wakil Ketua

Sumber: Situs Resmi DPRD Kabupaten Jember, 2019

Komisi B : Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan.

Tabel 3.4
Daftar Pimpinan Komisi B

No.	Nama	Partai Politik	Jabatan
1.	Bukri, S.Pd	PDIP	Ketua
2.	Budi “Pink” Wicaksono	Nasdem	Wakil Ketua

Sumber: Situs Resmi DPRDKabupaten Jember, 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KomisiC: Komisi C membidangi Pembangunan.

Tabel 3.5
Daftar Pimpinan Komisi C

No.	Nama	Partai Politik	Jabatan
1.	Siswono, S.IP	Gerindra	Ketua
2.	Anang Murwanto, S.Sos.	Demokrat	Wakil Ketua

Sumber: Situs Resmi DPRD Kabupaten Jember, 2019

Komisi D : Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 3.6
Daftar Pimpinan Komisi D

No.	Nama	Partai Politik	Jabatan
1.	Moch. Hafidi, S.Sos	PKB	Ketua
2.	Yudi Hartono, SE.	Golkar	Wakil Ketua

Sumber: Situs Resmi DPRD Kaupaten Jember, 2019

6. Hari Kerja DPRD Kabupaten Jember

Hari kerja DPRD adalah 5 (lima) hari yakni dari hari senin sampai dengan hari jum'at. Jam kerja dalam hari kerja dimulai pukul 08.00 wib hingga pukul 16.00 wib. Rapat DPRD dapat dilaksanakan di luar ketentuan yang dimaksud dengan persetujuan pimpinan DPRD.[73]

[73] Farouq, *Selayang Pandang DPRDKabupaten Jember* (Jember: Sekretariat DPRD Kabupten Jember,, 2016), 39.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu badan yang didalamnya terdapat suatu sistem kerja yang beraktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini berbentuk garis (*line*), dimana wewenang mengalir dari atasan ke bawahan. Bentuk garis ini dimaksudkan agar anggota DPRD dapat bertanggung jawab secara langsung atas tugas yang telah dibebankan dalam bidang masing-masing untuk menjamin kelancaran serta dapat dilakukan pengawasan secara baik dan efektif.

Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2014-2019.[74]

Gambar 3.1

Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember

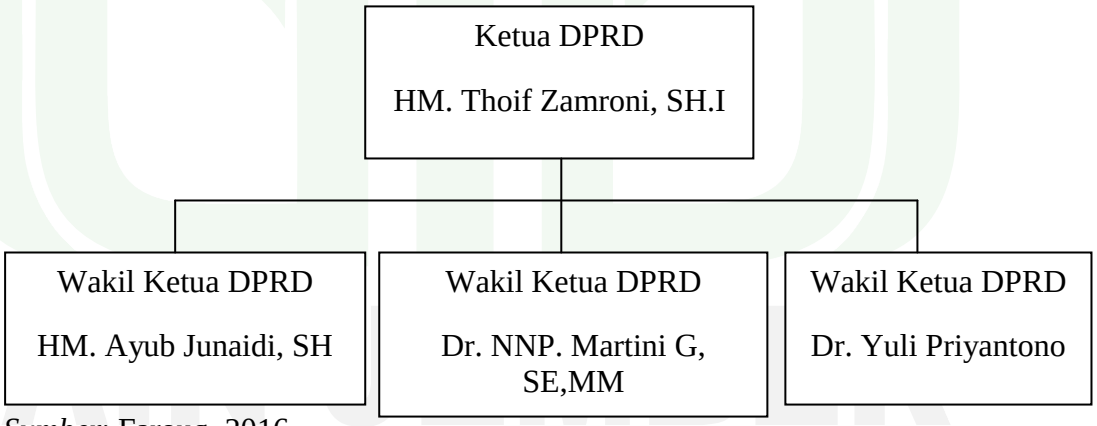

Sumber: Farouq, 2016

[74] Ibid, 43.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Gambar 3.2
Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember

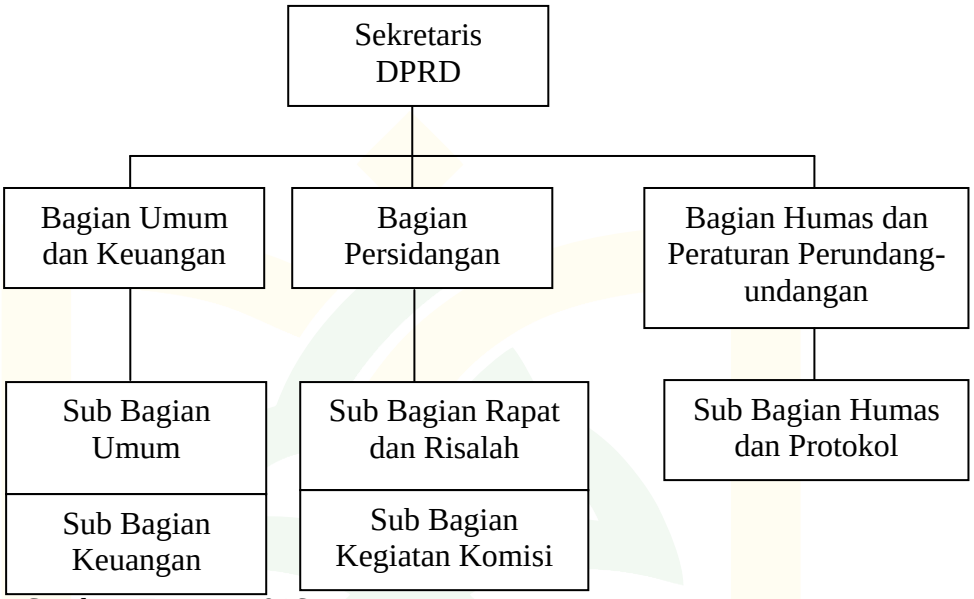

Sumber: Farouq, 2016

Gambar 3.3
Struktur Pejabat dan Staf Sekretaris DPRD Kabupaten Jember Tahun 2014-2019

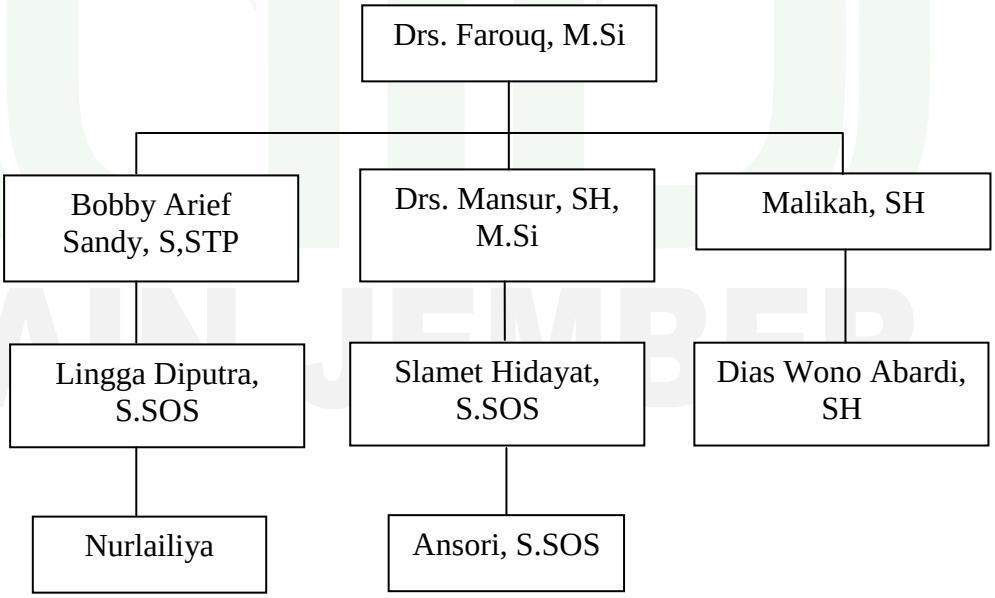

Sumber: Farouq, 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang pengaruh responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember, peneliti menggunakan kuesioner atau angket yang diberikan kepada responden sebanyak 44 anggota Dewan dari populasi yang berjumlah 50 anggota Dewan di DPRD Kabupaten Jember. Jumlah kuesioner yang dibagikan berjumlah 44 kuisioner kembali sebanyak 44 kuisioner. Setelah melalui pemrosesan data ke 44 kuesioner dapat diolah semua.

1. Uji Validitas

Uji validitas disini menggunakan rumus Bevariate Pearson SPSS yang dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n – 2, 44 – 2 = 42 dengan α (alpha) 5% (0,05) di dapat r_{tabel} = 0,304. Jika $r_{tabel} < r_{hitung}$ maka butir soal pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas menggunakan bantuan *SPSS Statistics versi 22*. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item Pertanyaan	Alpha (α)	r tabel	r hitung	Katerangan
1.	Responsibilitas (X1)	X1.1	0,05	0,304	0,652	Valid
		X1.2	0,05	0,304	0,675	Valid
		X1.3	0,05	0,304	0,577	Valid
		X1.4	0,05	0,304	0,603	Valid
		X1.5	0,05	0,304	0,596	Valid
		X1.6	0,05	0,304	0,617	Valid
		X1.7	0,05	0,304	0,407	Valid
		X1.8	0,05	0,304	0,449	Valid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2.	Kontribusi Masyarakat (X2)	X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304	0,664 0,700 0,817 0,746 0,666 0,607	Valid Valid Valid Valid Valid Valid
3.	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304	0,414 0,406 0,494 0,446 0,696 0,636 0,574 0,553	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
4.	Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304	0,478 0,349 0,374 0,389 0,389 0,460 0,439 0,541 0,472 0,514 0,327	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Sumber : Hasil data diolah SPSS (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam penelitian ini menunjukkan semua item penelitian dikatakan valid karena nilai $r_{tabel} < r_{hitung}$.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Uji reliabilitas menggunakan bantuan *SPSS Statistics versi 22*. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	*Cronbach alpha*	Standarisasi	Keterangan
1.	Responsibilitas (X1)	0,692	0,60	Reliabel
2.	Kontribusi Masyarakat (X2)	0,786	0,60	Reliabel
3.	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	0,612	0,60	Reliabel
4.	Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	0,620	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil data diolah SPSS (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach* Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel tersebut di atas adalah reliabel.

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

arah garis diagonalnya, maka model tersebut memenuhi asumsi normalitas.[75] Berikut hasil uji normalitas data dengan menggunakan bantuan *SPSS Statistics versi 22* sebagai berikut :

Gambar 3.4
Hasil Uji Normalitas

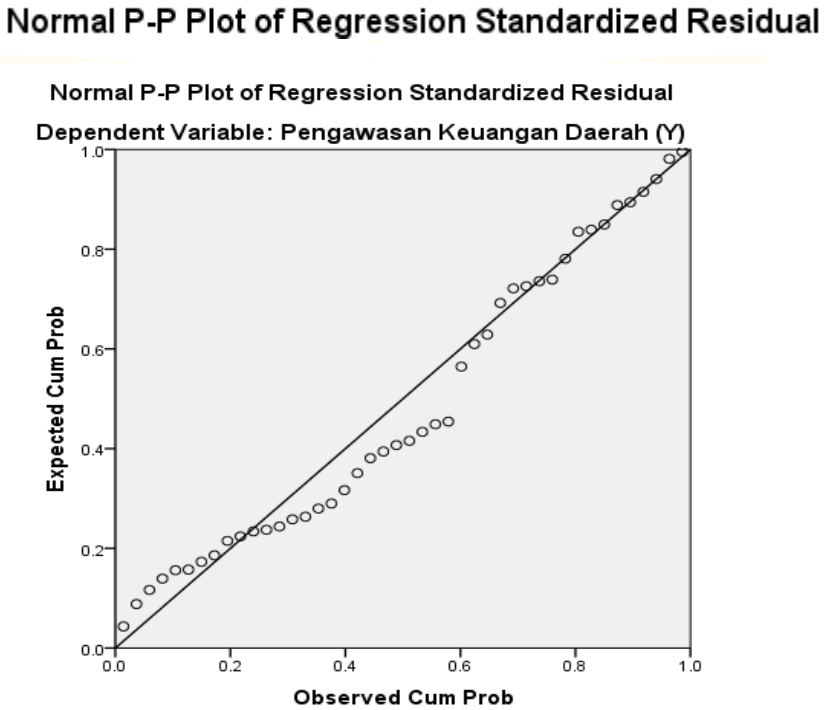

Sumber: Hasil Data diolah SPSS (terlampir)

Dari tampilan grafik normal plot terlihat titik-titik disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji gejala

[75] Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*, 77.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak mengandung multikolinieritas.[76]

Berikut hasil pengujian multikoliniearitas dengan menggunakan bantuan *SPSS Statistics versi 22* sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Uji Multikolinieritas

No.	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	(Constant) Responsibilitas (X1)	.864	1.157
2.	Kontribusi Masyarakat (X2)	.981	1.020
3.	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.877	1.141

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)
Sumber : Hasil data diolah SPSS (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji multikolinieritas model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, karena dapat dilihat dari nilai *tolerance* pada masing-masing variabel bebas atau independen yang lebih besar dari 0,10. Sedangkan perhitungan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

[76] Suliyanto, *Ekonometrika Terapan*, 81-90.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* di mana sumbu horizontal menggambarkan nilai *Predicted Standardized* sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai *Residual Standardized*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sebaliknya jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. *Scatterplot* dapat diamati di mana variabel bebas sebagai sumbu horizontal dan nilai residual kuadratnya sebagai sumbu vertikal.[77]

Berikut ini hasil uji heteroskerdastisitas dengan bantuan *SPSS Statistics Versi 22*:

[77] Ibid., 95.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Gambar 3.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

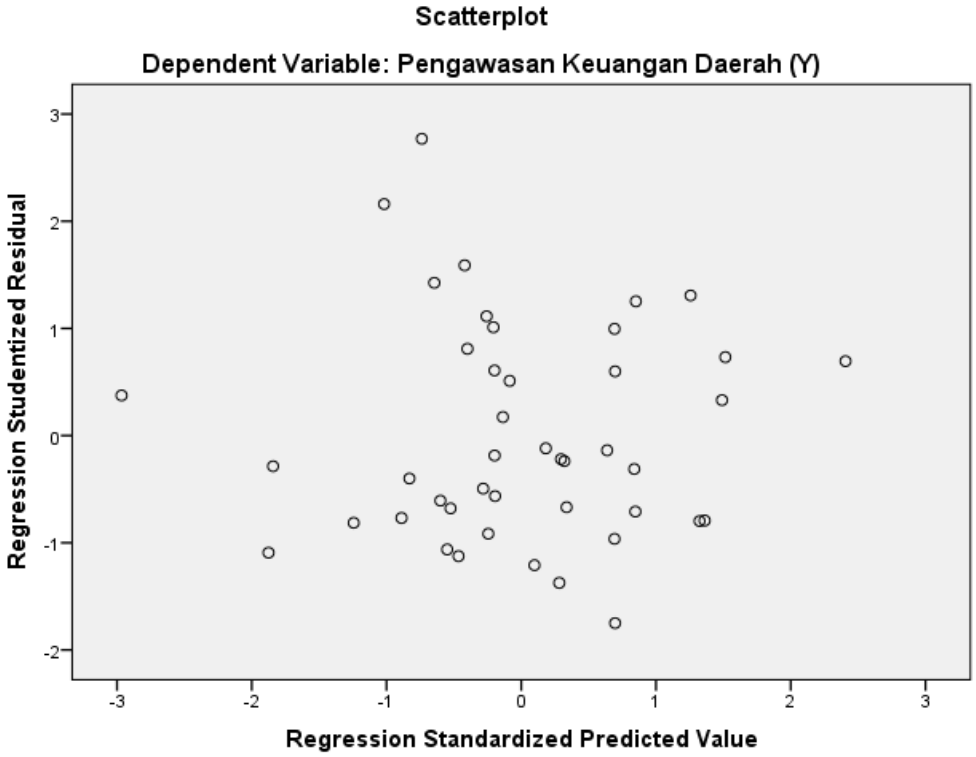

Sumber : Hasil data diolah SPSS (terlampir)

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas, dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

2. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil estimasi analisis regresi berganda dengan bantuan program *SPSS Statistics versi 22*, maka dalam proses perhitungannya diperoleh hasil sebagai berikut :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 3.10
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.928	5.980		.824	.415
	Responsibilitas (X1)	.342	.148	.291	2.305	.026
	Kontribusi Masyarakat (X2)	.428	.136	.373	3.145	.003
	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.418	.157	.333	2.661	.011

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : Hasil data diolah SPSS (terlampir)

Berdasarkan tabel di atas mengenai estimasi regresi linier berganda dengan bantuan program *SPSS Statistics versi 22*, maka dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 4{,}928 + 0{,}342\, X_1 + 0{,}428\, X_2 + 0{,}418\, X_3 + \epsilon$$

Di mana :

Y = Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

X_1 = Variabel Responsibilitas

X_2 = Variabel Kontribusi Masyarakat

X_3 = Variabel Transparansi Kebijakan Publik

ϵ = error

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) (Nilai konstanta) sebesar 4,928 menyatakan bahwa jika nilai responsibilitas, kontribusi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik konstan (tetap), maka pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 4,928 artinya berpengaruh postif.
2) Nilai β_1 sebesar 0,342 menyatakan bahwa jika responsibilitas mengalami kenaikan satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,342 pada pengawasan keuangan daerah dengan asumsi nilai variabel lain tetap.
3) Nilai β_2 sebesar 0,428 menyatakan bahwa jika kontribusi masyarakat mengalami kenaikan satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,428 pada pengawasan keuangan daerah dengan asumsi nilai variabel lain tetap.
4) Nilai β_3 sebesar 0,418 menyatakan bahwa jika transparansi kebijakan publik mengalami kenaikan satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,418 terhadap pengawasan keuangan daerah dengan asumsi nilai variabel lain tetap.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan bantuan program *SPSS Statistics versi 22* dapat dianalisis sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 3.11
Uji t (Parsial)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.928	5.980		.824	.415
	Responsibilitas (X1)	.342	.148	.291	2.305	.026
	Kontribusi Masyarakat (X2)	.428	.136	.373	3.145	.003
	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.418	.157	.333	2.661	.011

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : Hasil data diolah (terlampir)

1) Analisis Uji t pada Responsibilitas terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hipotesis yang akan diuji adalah:

a) H_a : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara responsibilitas terhadap pengawasan keuangan daerah.

b) H_0: Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara responsibilitas terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dengan nilai t pada variabel responsibilitas (X_1) adalah sebesar 2,305 dengan tingkat signifikansi 0,026 dengan t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (t_{hitung} 2,305 > t_{tabel} 2,021) sedangkan tingkat signifikansi 0,026 < 0,05, maka H_a diterima. Sehingga dapat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

disimpulkan bahwa responsibilitas secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah atau "Terdapat pengaruh yang signifikan antara responsibilitas terhadap pengawasan keuangan daerah.

2) Analisis Uji t pada kontribusi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah

Hipotesis yang akan diuji adalah:

a) H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah.

b) H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dengan nilai t pada variabel kontribusi masyarakat (X_2) adalah sebesar 3,145 dengan tingkat signifikansi 0,003 dan t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (t_{hitung} 3,145 > t_{tabel} 2,021) sedangkan tingkat signifikansi 0,003 < 0,05, maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi masyarakat secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah atau "Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) Analisis Uji t pada transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah

Hipotesis yang akan diuji adalah:

a) H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah.

b) H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dengan nilai t pada variabel transparansi kebijakan publik (X_3) adalah sebesar 2,661 dengan tingkat signifikansi 0,011 dan t_{tabel} sebesar 2,021. Karena t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 2,021) dan tingkat signifikansi 0,011 < 0,05, maka H_a diterima Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah atau "Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel responsibilitas, kontribusi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama, berikut ini hasil pengujian secara simultan dengan bantuan program *SPSS Statistics versi 22*:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 3.12
Uji F (Simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222.166	3	74.055	10.880	.000[b]
	Residual	272.265	40	6.807		
	Total	494.432	43			

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)
b. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik (X3), Kontribusi Masyarakat (X2), Responsibilitas (X1)

Sumber : Hasil data diolah SPSS (terlampir)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 10,880 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 < 0,05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (10,880 > 2,833).

Maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas yang meliputi responsibilitas (X_1), kontribusi masyarakat (X_2) dan transparansi kebijakan publik (X_3) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 adalah koefisien determinasi yakni suatu nilai yang menggambarkan total variasi dari Y (variabel dependen) dari suatu persamaan regresi.[78] R^2 merupakan fungsi yang menaik (*non decreasing function*) dari variabel-variabel bebas yang tercakup dalam persamaan regresi linier berganda. Semakin banyak variabel yang tercakup dalam model, makin menaik fungsi tersebut, artinya makin besar nilai R^2

[78] Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran*, 178.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut.[79] Berikut ini tabel uji koefisien determinasi dengan bantuan program *SPSS Statistics versi 22*:

Tabel 3.13
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670[a]	.449	.408	2.60895

a. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik (X3), Kontribusi Masyarakat (X2), Responsibilitas (X1)

Sumber : Hasil data diolah (terlampir)

Dari tabel di atas dilihat bahwa besarnya *R Square* adalah 0,449. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau independent yaitu responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dengan nilai sebesar 44,9%. Sedangkan sisanya (100% - 44,9% = 55,1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Analisis Variabel Responsibilitas (X_1) Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (individual) diperoleh perbandingan yaitu t_{hitung} 2,305 dengan tingkat signifikansi 0,026. Karena t_{hitung} 2,305 > t_{tabel} 2,021 dengan tingkat signifikansi 0,026 < 0,05. Kesimpulan: "Responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan

[79] Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, 131.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Keuangan Daerah ” atau dengan kata lain variabel Responsibilitas berpengaruh secara individual dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada DPRD Kabupaten Jember.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, jika anggota Dewan menerapkan prinsip responsibilitas (pertanggung jawaban) secara kontinue dengan memperhatikan objek yang telah di lakukan dan berdasarkan standarisasinya, maka hal ini akan berdampak terhadap pengawasan keuangan yang digelutinya dan terciptanya kepercayaan dalam kinerjanya.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) yang menunjukkan bahwa responsibilitas (pertanggung jawaban) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan tingkat signifikasi 0,000. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan pendapat Hary Harjono (2014) yang mengatakan bahwa variabel bebas responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa responsibilitas dalam pemerintah daerah diperlukan guna mewujudkan suatu kondisi yang responsibel dalam pemerintah daerah. Sehingga dengan terciptanya kondisi yang responsibel, memudahkan pengawasan keuangan daerah dan akan memicu kinerja pemerintahan yang baik (*good government*).

2. Analisis Variabel Kontribusi Masyarakat (X_2) Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (individual) diperoleh yaitu t_{hitung} sebesar 3,145 dengan tingkat signifikansi 0,003. Karena t_{hitung} 3,145 >

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

t_{tabel} 2,021 sedangkan tingkat signifikansi 0,003 < 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan: "Kontribusi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah" atau dengan kata lain variabel kontribusi masyarakat berpengaruh secara individual dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Jember.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat dalam memberikan kritik dan saran untuk menentukan strategi dan prioritas APBD. Sehingga, apabila masyarakat ikut serta dalam memberikan kontribusi dengan baik guna penyelenggaraan APBD. Maka akan memudahkan Dewan dalam pengawasan keuangan daerah supaya jauh dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta bersifat transparan .

3. Analisis Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X_3) Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (individual) diperoleh yaitu t_{hitung} sebesar 2,661 dengan tingkat signifikansi 0,011. Karena t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 2,021 sedangkan tingkat signifikansi 0,011 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan: "Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah" atau dengan kata lain variabel transparansi kebijkan publik berpengaruh secara

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

individual dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Jember.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cristin (2017) dan Ridho Agung (2015) yang menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian jika dalam transparansi kebijakan publik berjalan dengan baik dan tertib maka akan baik pula pengawasan keuangan suatu SKPD. Sehingga dengan menerapkan transparansi kebijakan publik akan membawa peningkatan pengawasan bagi anggota Dewan tersebut.

4. Analisis Variabel Independen Terhadap Dependen Secara Simultan

Berdasarkan perhitungan uji F dapat dilihat bahwa variabel responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuagan daerah. Terbukti perhitungan dari bantuan program *SPSS Statistics versi 22* bahwa nilai F_{hitung} sebesar 10,880 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan F_{tabel} 2,833, maka F_{hitung} 10,880 > F_{tabel} 2,833 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi kesimpulannya variabel responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuagan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Jember. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa apabila variabel responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

publik lebih ditingkatkan dan diperhatikan maka hal tersebut dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD) .

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul pengaruh responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD di Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Responsibitas Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

   Berdasarkan kriteria uji hipotesis secara parsial yaitu $_{hitung}$ 2,305 > t_{tabel} 2,021 sedangkan tingkat signifikansi 0,026 < 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Jember.

2. Pengaruh Variabel Kontribusi Masyarakat Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

   Berdasarkan kriteria uji hipotesis secara parsial yaitu t $_{hitung}$ 3,145 > t_{tabel} 2,021 sedangkan tingkat signifikansi 0,003 < 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa kontribusi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Jember.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jemt in-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Pengaruh Variabel Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan kriteria uji hipotesis secara parsial yaitu t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 2,021 sedangkan tingkat signifikansi 0,011 < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Jember.

4. Hasil pengujian secara simultan (bersama-sama) dapat dilihat bahwa variabel responsibilitas (X_1), kontribusi masyarakat (X_2) dan transparansi kebijakan publik (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (Y). Hasil perhitungan F_{hitung} sebesar 10,880 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 (0,000 < 0,05) dan F_{hitung} > F_{tabel} (10,880 > 2,833) yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi dalam mempengaruhi implikasi berbagai bidang, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini merupakan aplikasi mengenai hubungan antara responsibilitas keuangan, transparansi keuangan dan bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah daerah yang dalam hal ini mengenai APBD yang dilaukan oleh DPRD Kabupaten Jember. Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam bidang akuntansi dan khususnya bidang pengawasan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah atau dewan legislatif (DPRD) di seluruh Indonesia.

Bagi anggota Dewan untuk mendukung transparansi dan responsibilitas yang efektif dan efisien tersebut, pemerintah kabupaten / kota dapat mempublikasikan laporan pertanggung jawaban maupun temuan melalui media yang saat ini telah berkembang pesat, seperti website, surat kabar, majalah, dan televisi.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai dasar replikasi untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan angket atau kuesioner saja. Berdasarkan keterbatasan tersebut peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode selain kuesioner yang tidak lain dengan menggunakan metode interview supaya mendapatkan komunikasi dua arah dengan subjek dan mendapatkan kejujuran jawaban dari subjek, memperluas cakupan sampel dan populasi yang digunakan (bukan anggota dewan saja, melainkan juga dengan perangkat atau staf-stafnya). Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel lain yang diduga juga dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Misalnya dengan menambahkan variabel standart akuntansi pemerintahan atau menambahkan variabel pengetahuan dewan sebagai variabel moderating.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukmito. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok. FISIP UI Press.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. Rineka Cipta.

Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) studi kasus DPRD Kota Bengkulu*. Jurnal. Universitas Hasanudin.

Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Dprd-Jemberkab.go.id. (27 Maret 2019, Pukul 21.05 wib).

Farouq. 2016. *Selayang Pandang DPRD Kabupaten Jember*. Jember. Sekretariat DPRD Kabupten Jember.

Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif, Edisi kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.

Hanik, Umi. 2017. *Peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fungsi legislation, budgeting dan controling di DPRD Kabupaten Jember*. Sripsi. IAIN Jember.

Harjono, Heri dan Heny Kurniawati, dkk. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran (studi kasus Universitas Bina Nusantara)*, Jurnal Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat.

Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitiandengan Statistik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

https://ppid.kominfo.go.id/2011/03/15/pejabat-pengelola-informasi-dandokumentasi/(14 April 2018. Pukul 11.35 wib).

http://renirespita.blogspot.co.id/2015/05/mtode-penelitian-kerangka-konseptual.html. (19 Mei 2018, pukul 09.21 wib).

http:/tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9356-partisipasi-masyarakat-dalam-pembuatan-dan-evaluasi-kebikakan-daerah.html (14 April 2018. Pukul 09.52 wib).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aspirasi/ (14 April 2018. Pukul 09.08 wib).

Karubaba, Cristin Jois. 2017.*Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating di Kabupaten Nabire.*Skripsi, Universitas Sumatra Utara.

Krisherdian, Rido Agung Gigih. 2015. *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember*. Jurnal, Universitas Jember.

Mundir. 2014. *Statistik Pendidikan.* Jember. STAIN Press Jember.

Nugraha, Baskara Adi. 2015. *Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada kabupaten Sumatra*.Naskah publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prasetya, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Putra, Gerryan. 2017. *Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu Hulu*. Jurnal, JOM Fekom, Hulu.

RI, Kementrian Agama. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Tangerang. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Riduwan dan Adun Rusyana dkk. 2013. *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung. Alfabeta.

Riduwan dan Sunarto. 2014. *Pengantar Statistik untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis.* Bandung. Alfabeta.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta. Andi.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R & D*. Bandung. Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta. Andi.

Sumami, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. Andi.

Supriyanto, Achmad Seni dan Masyhuri Machfudz. 2010. *Metode Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*. Malang. UIN Maliki Press.

Tim penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Press.

Tribunnews.surya.co.id (1 Februari 2019, Pukul 22.00 wib).

Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan: Paradigma Positifistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta. Rajawali Press.

Wazir, Ach. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta. Prevention and Project.

Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang. UMM Press.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Hipotesis	Rumusan Masalah
Pengaruh responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijkan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember.	1. Responsibilitas (X_1) 2. Kontribusi Masyarakat (X_2) 3. Transparansi Kebijakan Publik (X_3) 4. Pengawasan keuangan daerah (Y)	a). Perencanaan stratejik b). Perencanaan kinerja c).Pengukuran dan evaluasi kinerja d).Pelaporan responsibilitas a). Aspirasi masyarakat b). Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi a). Kebijakan terbuka terhadap pengawasan b). Akses informasi c). Prinsip *check and balance* a). Penyusunan APBD b). Pengesahan APBD c). Pelaksanaan APBD d).Pertanggungjawaban APBD	Data primer: 1). Kuisioner	1. Pendekatan dan jenis penelitian: Menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis *field research* (penelitian lapangan) 2. Populasi dan sempel: Penentuan sampel menggunakan metode *probability sampling* 3. Metode analisis data: Menggunakan rumusan regresi linier berganda: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$	H1: Responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah H0: Responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. H2: Kontribusi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah H0: Kontribusi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah H3: . Transparansi kebijakan publik	1. Apakah responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember? 2. Apakah kontribusi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember? 3. Apakah transparansi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

					berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah H0: Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. H4: Responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah H0: Responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah	kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember? 4. Apakah responsibilitas, kontribusi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) DPRD di Kabupaten Jember?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Hardianti

NIM : E20153021

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember" adalah sebenar-benarnya hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Jember, 9 Mei 2019

Saya yang menyatakan

Lina Hardianti
NIM.E20153021

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B..../In.20/7.a/PP.00.9/..../2019

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Ketua DPRD Kabupaten Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Lina Hardianti

NIM : E20153021

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : Akuntansi Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Alamatq : Sembon Mbentis, Ngajum, Malang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

No TLP : 083848092864

Judul Skripsi : "Pengaruh Responsibilas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember"

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 4 Maret 2019

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat: Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444-335567 (Fax.)
JEMBER – 68121

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: / / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUPRIONO, ST, M.Si

NIP : 19730302 199901 1 001

Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LINA HARDIANTI

NIM : E20153021

Prodi/Fak/Univ : Akuntansi Syariah/ Ekonomi & Bisnis Islam/ IAIN Jember

Sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d 24 April 2019 Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian tentang "Pengaruh Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember" di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 30 April 2019

Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

JUPRIONO, ST, M.Si
NIP: 19730302 199901 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

BLANGKO KETERSEDIAAN MENGISI KUISIONER

Kepada Yth,

Anggota Dewan DPRD Kabupaten Jember

di tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya yang bernama Lina Hardianti merupakan mahasiswi dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang sedang menyusun skripsi dengan judul **Pengaruh Responsibilitas, Kontribusi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Jember.**

Untuk keperluan ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu anggota Dewan untuk berkenan mengisi kuisioner ini. Hasil dari penelitian ini nantinya akan bermanfaat pada bidang keilmuan dan praktek pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Oleh sebab itu sangat diharapkan jawaban yang subjektif mungkin sesuai dengan keadaan yang ada. Kuesioner ini bukan suatu ujian atau suatu tes penilaian untuk mengukur atau mencari suatu kekurangan, namun merupakan suatu alat untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini. Tidak ada jawaban benar atau salah, melainkan yang ingin dicari adalah keakuratan informasi sesuai dengan keadaan dan kenyataan di DPRD Kabupaten Jember.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu anggota Dewan mengisi kuisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Lina Hardianti

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DATA HASIL ANGKET VARIABEL XI, X2, X3 DAN VARIABEL Y																																						
No	NOMOR BUTIR ANGKET/PERNYATAAN																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	1	2	3	4	5	6	X2	1	2	3	4	5	6	7	8	X3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Y	Total
1	3	2	3	3	4	4	3	2	24	4	4	2	4	3	3	20	2	4	3	4	3	2	3	4	25	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	33	102
2	2	4	4	4	4	4	4	4	30	4	4	4	3	3	3	21	4	2	4	2	3	4	3	3	25	3	3	2	2	4	3	4	3	2	2	4	32	108
3	3	4	3	4	3	4	4	4	29	4	4	2	4	4	3	21	4	3	3	4	3	3	2	4	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34	110
4	4	4	4	4	5	4	4	3	33	4	4	1	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	39	125
5	3	4	3	4	4	4	4	4	30	4	4	2	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	4	32	2	4	4	3	4	4	3	4	5	3	4	40	124
6	5	4	5	4	4	4	4	5	35	5	5	4	5	5	5	29	4	5	4	4	5	5	4	5	36	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	46	146
7	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	5	5	5	5	28	5	4	3	3	4	4	4	4	31	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42	132
8	3	4	3	3	3	4	5	2	27	5	5	4	5	4	4	27	4	3	3	4	3	3	4	4	28	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	41	123
9	3	3	3	4	4	4	4	4	29	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	4	5	5	34	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	40	133
10	4	4	4	4	4	4	4	3	31	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4	4	4	31	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	39	127
11	3	4	3	4	4	4	4	4	30	5	5	5	4	4	4	27	4	3	4	4	3	4	3	3	28	3	2	4	4	3	3	4	3	4	3	4	37	122
12	4	4	4	4	4	3	4	4	31	5	5	4	4	4	4	26	4	3	3	3	3	3	3	4	26	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	36	119
13	4	4	4	4	4	3	3	3	29	5	5	5	5	4	4	28	4	3	3	3	3	3	3	4	26	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	36	119
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4	3	3	5	5	5	33	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40	131
15	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	41	126
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	4	28	4	2	2	4	3	4	4	5	28	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	39	127
17	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	4	4	5	4	4	34	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	40	134
18	3	3	3	3	4	3	4	4	27	5	5	4	4	4	4	26	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	118
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	5	3	4	4	4	25	4	3	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	36	124
20	4	4	4	4	4	4	4	3	31	5	5	5	5	5	5	30	3	3	3	3	4	4	4	3	27	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	38	126
21	3	4	3	3	4	4	4	4	29	3	3	3	4	4	4	21	4	4	3	4	4	4	4	5	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	126

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

22	4	3	3	3	3	4	4	3	27	5	5	4	4	4	4	26	3	3	3	3	3	4	4	4	27	4	3	3	5	4	4	3	4	5	4	3	42	122
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	3	3	3	3	5	29	4	4	4	5	3	3	3	3	3	5	3	40	126
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	4	3	4	5	4	23	4	5	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	5	3	4	3	3	3	36	118
25	3	3	3	3	4	4	4	5	29	4	4	3	3	4	4	22	5	4	3	4	4	4	4	4	32	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	118
26	3	3	5	5	3	3	3	3	28	3	3	3	4	4	4	21	5	3	5	3	3	3	5	5	32	2	5	4	3	5	3	3	2	3	2	3	35	116
27	2	3	3	3	3	3	4	4	25	5	5	5	5	5	5	30	3	5	3	3	3	4	3	5	29	5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	38	122
28	4	3	3	4	5	4	4	3	30	5	5	5	5	5	4	29	4	5	4	3	3	3	3	3	28	3	4	3	4	4	3	5	4	3	3	3	39	126
29	5	5	5	4	4	4	3	2	32	5	4	4	5	5	5	28	4	3	3	3	3	3	3	3	25	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	41	126
30	3	5	5	4	4	4	3	4	32	5	4	4	3	4	5	25	3	5	3	3	4	4	4	4	30	2	2	4	5	3	4	4	4	2	4	2	36	123
31	3	3	4	3	5	4	4	5	31	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	4	4	4	3	4	32	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	3	45	138
32	4	4	4	3	4	4	4	4	31	5	5	4	5	5	3	27	4	3	4	4	4	4	4	5	32	4	3	4	3	4	3	4	4	5	5	4	43	133
33	3	3	5	5	4	4	4	3	31	5	5	4	4	5	2	25	3	4	3	3	3	4	5	3	28	5	4	4	3	4	4	4	5	2	3	4	42	126
34	3	3	5	5	4	3	4	4	31	4	4	4	3	5	3	23	4	5	4	3	3	4	4	4	31	2	4	2	4	3	3	3	4	3	5	3	36	121
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	3	22	3	4	4	4	4	4	4	4	31	2	4	5	4	3	3	4	2	4	3	3	37	122
36	4	4	5	5	3	4	3	3	31	5	5	5	5	4	4	28	4	4	4	4	4	3	3	5	31	4	3	4	5	3	4	3	3	3	3	1	36	126
37	4	4	5	3	3	3	3	3	28	4	5	4	4	4	3	24	3	3	3	4	3	4	4	3	27	2	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	34	113
38	5	3	5	4	4	4	3	3	31	5	5	4	4	5	4	27	4	4	4	4	3	5	4	4	32	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	38	128
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	5	5	28	4	3	5	4	4	4	4	3	31	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	39	130
40	4	4	3	4	3	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	26	3	4	3	4	3	4	4	4	29	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	40	125
41	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	44	140
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4	4	3	3	3	3	30	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	43	139
43	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	3	3	3	3	3	27	3	4	3	4	4	4	5	3	4	4	2	40	130
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	5	29	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	44	135

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DATA HASIL ANGKET VARIABEL X

No	NOMOR BUTIR ANGKE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	1	2	3	4	5	6	X2	1	2	3	4
1	3	2	3	3	4	4	3	2	24	4	4	2	4	3	3	20	2	4	3	4
2	2	4	4	4	4	4	4	4	30	4	4	4	3	3	3	21	4	2	4	2
3	3	4	3	4	3	4	4	4	29	4	4	2	4	4	3	21	4	4	3	3
4	4	4	4	4	5	4	4	3	33	4	4	1	4	4	4	21	4	4	4	4
5	3	4	3	4	4	4	4	4	30	4	4	2	4	4	4	22	4	4	4	4
6	5	4	5	4	4	4	4	5	35	5	5	4	5	5	5	29	4	5	4	4
7	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	5	5	5	5	28	5	4	3	3
8	3	4	3	3	3	4	5	2	27	5	5	4	5	4	4	27	4	4	3	4
9	3	3	3	4	4	4	4	4	29	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3	31	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4
11	3	4	3	4	4	4	4	4	30	5	5	5	4	4	4	27	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	3	4	4	31	5	5	4	4	4	4	26	4	3	3	3
13	4	4	4	4	4	3	3	3	29	5	5	5	5	4	4	28	4	3	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4	3
15	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	4	28	2	4	2	4
17	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	4
18	3	3	3	3	4	3	4	4	27	5	5	4	4	4	4	26	4	3	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	5	3	4	4	4	25	4	3	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	3	31	5	5	5	5	5	5	30	3	3	3	3
21	3	4	3	3	4	4	4	4	29	3	3	3	4	4	4	21	4	4	3	4
22	4	3	3	3	3	4	4	3	27	5	5	4	4	4	4	26	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	3
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	4	3	4	5	4	23	4	5	3	3
25	3	3	3	3	4	4	4	5	29	4	4	3	3	4	4	22	5	4	3	4
26	3	3	5	5	3	3	3	3	28	3	3	3	4	4	4	21	5	3	5	3
27	2	3	3	3	3	3	4	4	25	5	5	5	5	5	5	30	3	5	3	3
28	4	3	3	4	5	4	4	3	30	5	5	5	5	5	4	29	4	5	4	3
29	5	5	5	4	4	4	3	2	32	5	4	4	5	5	5	28	4	3	3	3
30	3	5	5	4	4	4	3	4	32	5	4	4	3	4	5	25	3	5	3	3
31	3	3	4	3	5	4	4	5	31	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	4
32	4	4	4	3	4	4	4	4	31	5	5	4	5	5	3	27	4	3	4	4
33	3	3	5	5	4	4	4	3	31	5	5	4	4	5	2	25	3	4	3	3
34	3	3	5	5	4	3	4	4	31	4	4	4	3	5	3	23	4	5	4	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	3	22	3	4	4	4
36	4	4	5	5	3	4	3	3	31	5	5	5	5	4	4	28	4	4	4	4
37	4	4	5	3	3	3	3	3	28	4	5	4	4	4	3	24	3	4	3	3
38	5	3	5	4	4	4	3	3	31	5	5	4	4	5	4	27	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	5	5	28	4	3	5	4
40	4	4	3	4	3	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	26	3	4	3	4
41	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	5	29	4	3	3	4

	1	2	3	4	5	6	7	8	X1	1	2	3	4	5	6	X2	1	2	3	4

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1	3	2	3	3	4	4	3	2	24	4	4	2	4	3	3	20	2	4	3	4
2	2	4	4	4	4	4	4	4	30	4	4	4	3	3	3	21	4	2	4	2
3	3	4	3	4	3	4	4	4	29	4	4	2	4	4	3	21	4	3	3	4
4	4	4	4	4	5	4	4	3	33	4	4	1	4	4	4	21	4	4	4	4
5	3	4	3	4	4	4	4	4	30	4	4	2	4	4	4	22	4	4	4	4
6	5	4	5	4	4	4	4	5	35	5	5	4	5	5	5	29	4	5	4	4
7	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	5	5	5	5	28	5	4	3	3
8	3	4	3	3	3	4	5	2	27	5	5	4	5	4	4	27	4	3	3	4
9	3	3	3	4	4	4	4	4	29	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3	31	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4
11	3	4	3	4	4	4	4	4	30	5	5	5	4	4	4	27	4	3	4	4
12	4	4	4	4	4	3	4	4	31	5	5	4	4	4	4	26	4	3	3	3
13	4	4	4	4	4	3	3	3	29	5	5	5	5	4	4	28	4	3	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4	3
15	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	4	28	4	2	2	4
17	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	4	4	4	27	5	4	4	4
18	3	3	3	3	4	3	4	4	27	5	5	4	4	4	4	26	4	3	3	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	5	3	4	4	4	25	4	3	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	3	31	5	5	5	5	5	5	30	3	3	3	3
21	3	4	3	3	4	4	4	4	29	3	3	3	4	4	4	21	4	4	3	4
22	4	3	3	3	3	4	4	3	27	5	5	4	4	4	4	26	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	3
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	4	3	4	5	4	23	4	5	3	3
25	3	3	3	3	4	4	4	5	29	4	4	3	3	4	4	22	5	4	3	4
26	3	3	5	5	3	3	3	3	28	3	3	3	4	4	4	21	5	3	5	3
27	2	3	3	3	3	3	4	4	25	5	5	5	5	5	5	30	3	5	3	3
28	4	3	3	4	5	4	4	3	30	5	5	5	5	5	4	29	4	5	4	3
29	5	5	5	4	4	4	3	2	32	5	4	4	5	5	5	28	4	3	3	3
30	3	5	5	4	4	4	3	4	32	5	4	4	3	4	5	25	3	5	3	3
31	3	3	4	3	5	4	4	5	31	5	5	5	5	5	5	30	4	5	4	4
32	4	4	4	3	4	4	4	4	31	5	5	4	5	5	3	27	4	3	4	4
33	3	3	5	5	4	4	4	3	31	5	5	4	4	5	2	25	3	4	3	3
34	3	3	5	5	4	3	4	4	31	4	4	4	3	5	3	23	4	5	4	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	3	22	3	4	4	4
36	4	4	5	5	3	4	3	3	31	5	5	5	5	4	4	28	4	4	4	4
37	4	4	5	3	3	3	3	3	28	4	5	4	4	4	3	24	3	3	3	4
38	5	3	5	4	4	4	3	3	31	5	5	4	4	5	4	27	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	5	5	5	28	4	3	5	4
40	4	4	3	4	3	4	4	4	30	5	5	4	4	4	4	26	3	4	3	4
41	5	5	5	5	5	5	5	4	39	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	5	33	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	5	29	4	3	3	4

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

I, X2, X3 DAN VARIABEL Y																	
T/PERNYATAAN																	
5	6	7	8	X3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Y	Total
3	2	3	4	25	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33	102
3	4	3	3	25	3	3	3	4	2	2	4	3	2	2	4	32	108
3	3	2	4	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34	110
4	4	4	4	32	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	39	125
4	4	4	4	32	2	4	4	4	4	4	3	5	3	3	4	40	124
5	5	4	5	36	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	46	146
4	4	4	4	31	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42	132
3	3	3	4	28	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	41	123
4	4	5	5	34	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	40	133
4	4	4	4	31	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	39	127
3	3	3	3	28	3	2	4	4	3	3	4	3	3	4	4	37	122
3	3	3	4	26	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36	119
3	3	3	4	26	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	36	119
3	5	5	5	33	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40	131
4	4	4	4	31	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	126
3	4	4	5	28	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	39	127
4	5	4	4	34	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	40	134
4	4	4	4	30	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	118
4	4	4	4	31	4	4	4	3	3	3	2	4	3	3	3	36	124
4	4	4	3	27	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	38	126
4	4	4	5	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	126
3	4	4	4	27	4	3	4	4	4	3	3	5	5	4	3	42	122
3	3	3	5	29	4	4	4	3	3	3	3	3	5	5	3	40	126
3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	5	3	4	3	3	3	36	118
4	4	4	4	32	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	118
3	3	5	5	32	2	5	4	3	3	3	3	2	3	2	5	35	116
3	4	3	5	29	5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	38	122
3	3	3	3	28	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	5	39	126
3	3	3	3	25	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	41	126
4	4	4	4	30	2	2	3	2	2	4	4	4	4	4	5	36	123
4	4	3	4	32	5	4	3	4	4	4	4	5	5	4	3	45	138
4	4	4	5	32	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	43	133
3	4	5	3	28	5	4	2	4	4	4	4	5	3	3	4	42	126
3	4	4	4	31	2	4	3	4	3	3	3	4	2	5	3	36	121
4	4	4	4	31	2	4	3	4	5	3	4	2	4	3	3	37	122
4	3	3	5	31	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	1	36	126
3	4	4	3	27	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	34	113
3	5	4	4	32	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	38	128
4	4	4	3	31	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	39	130
3	4	4	4	29	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	40	125
4	4	4	5	33	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	44	140
3	3	3	3	30	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	43	139
3	3	3	3	27	3	4	3	4	4	4	5	3	4	4	2	40	130
4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3	44	135

5	6	7	8	X3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Y	Total

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3	2	3	4	25	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	33	102
3	4	3	3	25	3	3	2	2	4	3	4	3	2	2	4	32	108
3	3	2	4	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34	110
4	4	4	4	32	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	39	125
4	4	4	4	32	2	4	4	3	4	4	3	4	5	3	4	40	124
5	5	4	5	36	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	46	146
4	4	4	4	31	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42	132
3	3	4	4	28	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	41	123
4	4	5	5	34	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	40	133
4	4	4	4	31	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	39	127
3	4	3	3	28	3	2	4	4	3	3	4	3	4	3	4	37	122
3	3	3	4	26	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	36	119
3	3	3	4	26	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	36	119
3	5	5	5	33	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40	131
4	4	4	4	31	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	41	126
3	4	4	5	28	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	39	127
4	5	4	4	34	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	40	134
4	4	4	4	30	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	118
4	4	4	4	31	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	36	124
4	4	4	3	27	2	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	38	126
4	4	4	5	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	126
3	4	4	4	27	4	3	3	5	4	4	3	4	5	4	3	42	122
3	3	3	5	29	4	4	4	5	3	3	3	3	3	5	3	40	126
3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	5	3	4	3	3	3	36	118
4	4	4	4	32	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	118
3	3	5	5	32	2	5	4	3	5	3	3	2	3	2	3	35	116
3	4	3	5	29	5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	38	122
3	3	3	3	28	3	4	3	4	4	3	5	4	3	3	3	39	126
3	3	3	3	25	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	41	126
4	4	4	4	30	2	2	4	5	3	4	4	4	2	4	2	36	123
4	4	3	4	32	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	3	45	138
4	4	4	5	32	4	3	4	3	4	3	4	4	5	5	4	43	133
3	4	5	3	28	5	4	4	3	4	4	4	5	2	3	4	42	126
3	4	4	4	31	2	4	2	4	3	3	3	4	3	5	3	36	121
4	4	4	4	31	2	4	5	4	3	3	4	2	4	3	3	37	122
4	3	3	5	31	4	3	4	5	3	4	3	3	3	3	1	36	126
3	4	4	3	27	2	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	34	113
3	5	4	4	32	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	38	128
4	4	4	3	31	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	39	130
3	4	4	4	29	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	40	125
4	4	4	5	33	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	44	140
3	3	3	3	30	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	43	139
3	3	3	3	27	3	4	3	4	4	4	5	3	4	4	2	40	130
4	4	4	4	30	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	44	135

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KUISIONER

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Akademi ☐ S1/S2/S3

PETUNJUK PENGISIAN

Untuk pernyataan di bawah ini, berikan tanda centang (v) pada kolom jawaban (STS/TS/N/S/SS) yang sesuai dengan pilihan saudara.

Keterangan:

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat setuju

Contoh:

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Restrada dan arah kebijakan umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD.				v	

Artinya:

Saudara setuju bahwa Restrada dan AKU APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

A. Variabel Responsibilitas (Pertanggungjawaban)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Untuk melaksanakan mandat diperlukan perencanaan stratejik.					
2.	Indikator kinerja telah digunakan untuk mengevaluasi APBD.					
3.	Rencana kinerja sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan / kegagalan pada periode tertentu.					
4.	Rencana kinerja menyangkut sasaran, target dan program yang akan dilaksanakan.					
5.	Pengukuran kinerja sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.					
6.	Evaluasi kinerja untuk mengetahui pencapaian kemajuan dan kendala guna pelaksanaan program di masa mendatang.					
7.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota.					
8.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban telah mengikuti prinsip lazim, jujur, objektif dan transparan.					

B. Variabel Konstribusi Masyarakat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukkan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD.					
2.	Kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi dan prioritas APBD.					
3.	Aspirasi masyarakat menjadi usulan tidak terwujud jika pemerintah tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.					
4.	Masyarakat berhak mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan daerah yang telah ada.					
5.	DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.					
6.	Masyarakat mempunyai hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan					

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	pemerintahan daerah.					

C. Variabel Transparansi Kebijakan Publik

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi.					
2.	Pengawasan keuangan daerah bersifat jelas, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.					
3.	Sepengetahuan saya laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat waktu.					
4.	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.					
5.	Selama ini saya merasa mudah mengakses dokumen publik tentang APBD.					
6.	Keterbukaan mengakses informasi dapat mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).					
7.	Prinsip *check and balance* menegaskan adanya mekanisme saling kontrol antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.					
8.	Prinsip *check and balance* dimaksudkan agar tidak terjadi *overlopping* (tumpang tindih) antara kewenangan lembaga negara.					

D. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Terdapat tiga perencanaan pemerintah yakni Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).					
2.	Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.					
3.	Dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yakni					

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	nota keuangan dan rancangan APBD.					
4.	Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.					
5.	Persetujuan Raperda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.					
6.	Rancangan yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.					
7.	Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
8.	Setiap pengeluaran yang digunakan untuk belanja daerah harus didukung bukti yang lengkap dan sah.					
9.	Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).					
10.	Pertanggungjawaban APBD dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.					
11.	Laporan keuangan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selmbat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran beakhir.					

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Hasil Output SPSS Statistics 22 (Uji Normalitas)

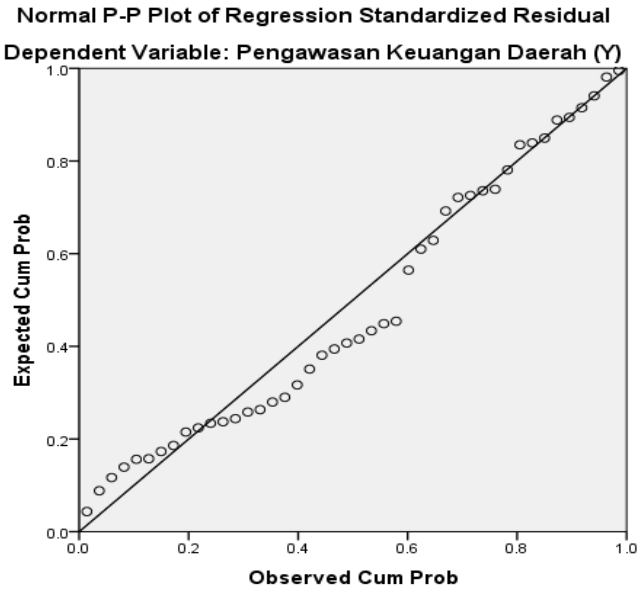

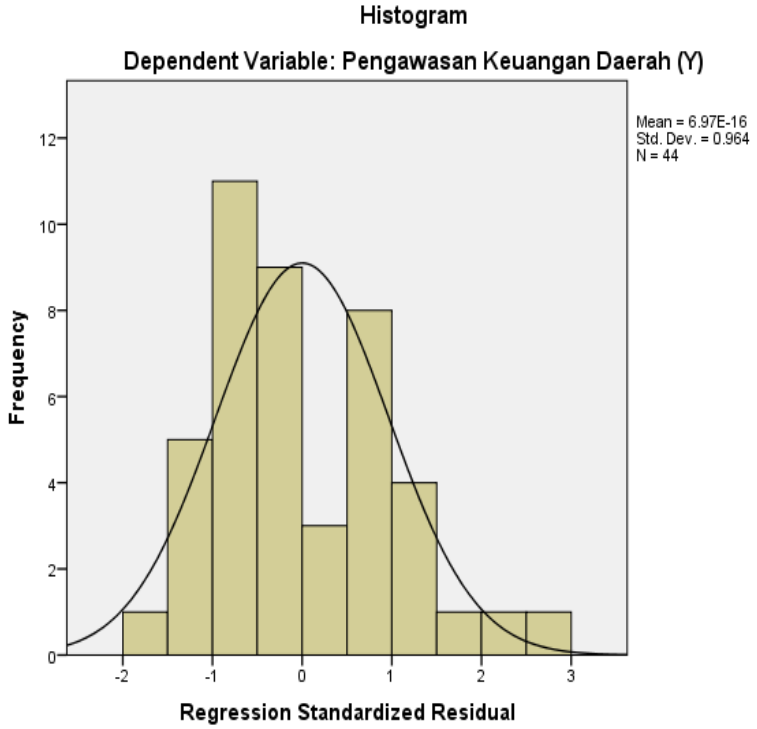

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Hasil Output SPSS Statistics 22 (Uji Multikolinieritas)

No.	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	(Constant) Responsibilitas (X1)	.864	1.157
2.	Kontribusi Masyarakat (X2)	.981	1.020
3.	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.877	1.141

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Responsibilitas (X1)	Kontribusi Masyarakat (X2)	Transparansi Kebijakan Publik (X3)
1	1	3.981	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.011	19.140	.00	.08	.81	.11
	3	.005	27.214	.01	.78	.00	.55
	4	.003	35.199	.99	.14	.19	.34

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Hasil Output SPSS Statistics 22 (Uji Heteroskedastisitas)

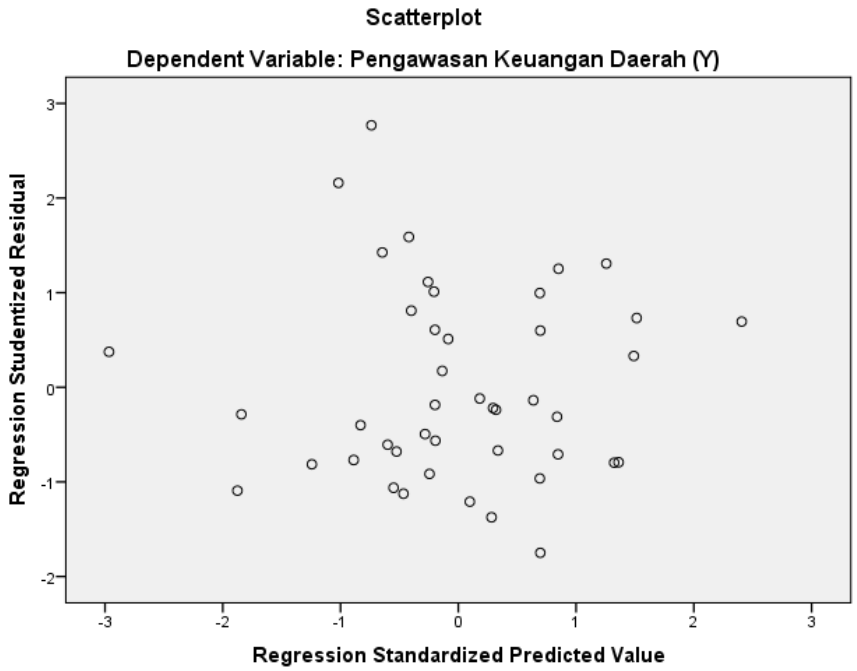

5. Hasil Output SPSS Statistics 22 (Regresi Linier Berganda)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.928	5.980		.824	.415		
	Responsibilitas (X1)	.342	.148	.291	2.305	.026	.864	1.157
	Kontribusi Masyarakat (X2)	.428	.136	.373	3.145	.003	.981	1.020
	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.418	.157	.333	2.661	.011	.877	1.141

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Hasil Output SPSS Statistics 22 (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.928	5.980		.824	.415
	Responsibilitas (X1)	.342	.148	.291	2.305	.026
	Kontribusi Masyarakat (X2)	.428	.136	.373	3.145	.003
	Transparansi Kebijakan Publik (X3)	.418	.157	.333	2.661	.011

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

7. Hasil Output SPSS Statistics 22 (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222.166	3	74.055	10.880	.000[b]
	Residual	272.265	40	6.807		
	Total	494.432	43			

a. Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik (X3), Kontribusi Masyarakat (X2), Responsibilitas (X1)

8. Hasil Output SPSS Statistics (Uji R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670[a]	.449	.408	2.60895

a. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik (X3), Kontribusi Masyarakat (X2), Responsibilitas (X1)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL PENELITIAN

No	Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Senin/ 11 Maret 2019	Menyerahkan surat izin penelitian skripsi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember.	
2.	Selasa/ 12 Maret 2019	Mengambil surat rekomendasi dari Bakesbangpol dan menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada Bagian Administrasi dan Umum DPRD Kabupaten Jember.	
3.	Rabu/ 13 Maret 2019	Menembusi surat rekomendasi penelitian skripsi kepada Bagian Humas DPRD Kabupaten Jember.	
4.	Senin/ 18 Maret 2019	Menyerahkan kuesioner atau angket penelitian kepada Bapak Dias Wono Abardi, SH,. selaku staf sekretaris DPRD Kabupaten Jember.	
5.	Rabu/ 24 April 2019	Pengambilan kuesioner atau angket penelitian	
6.	Selasa, 30 April 2019	Pengambilan surat izin selesai melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Jember.	

Mengetahui,
Kabag Humas dan Peraturan PerUU

SUTIYOSO, SH

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

1. Pengambilan Kuesioner kepada Bapak Dias Wono Abardi

2. Gedung DPRD Kabupaten Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Lantai Dasar Gedung DPRD Kabupaten Jember

4. Pengambilan surat selesai penelitian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Pemberian cinderamata kepada DPRD Kabupaten Jember

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Lina Hardianti
NIM	: E20153021
Tempat, Tgl Lahir	: Malang, 12 September 1996
Alamat	: Dsn. Sembon Mbentis Rt 06 Rw 10, Ds. Ngajum, Kec. Ngajum Kabupaten Malang
No. HP	: 083848092864
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah

1. Riwayat Pendidikan
   a. TK PGRI 03 Sembon Ngajum lulus pada tahun 2003
   b. SD Negeri Ngajum 04 lulus pada tahun 2009
   c. SMP Negeri 1 Ngajum lulus pada tahun 2012.
   d. SMK Taman Siswa Kepanjen Malang lulus pada tahun 2015.
   e. IAIN Jember lulus pada tahun 2019.
2. Pengalaman Organisasi
   a. Anggota PRAMUKA dari SD sampai dengan SMK.
   b. Anggota OSIS di SMK Taman Siswa Kepanjen Malang periode 2013/2014.
   c. Anggota Litbang Assent Ace IAIN Jember periode 2016/2017.
   d. Bendahara umum HMPS AKS periode 2017/2018.
   e. Bendahara umum PMII Rayon FEBI periode 2018/2019.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id